

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum

Siwalimanews.com merupakan berita versi daring dari koran Siwalima. Koran Siwalima awalnya hanya menjadi media cetak yang menerbitkan berita sebanyak enam kali dalam seminggu. Pertama kali cetak Koran Siwalima memiliki tampilan format halaman sebanyak delapan dengan warna hitam – putih dan berukuran tabloid. Tampilan itu terus bertambah menjadi 16 halaman dan sampai sekarang. PT Siwalima merupakan portal terbesar di Maluku. Siwalima melihat konflik secara umum karena konflik Maluku 6 kali dalam sebulan dan sebagai pencetus jurnalis untuk damai (lampiran 1, hal a).

PT Siwalima adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1999 yang terus berkembang. Pada tanggal 25 Juni 1999 menjadi tahun pertama berita Siwalima diluncurkan. Kantor Siwalima beralamat di Jalan Raya Diponegoro No20, 97124, Ambon. Selanjtnya nomor telepon redaksi: +62911 347666, famili: +62911341137 dengan email: redaksi@siwalimanews.com, hotline@siwalimanews.com, siwalimanews@yahoo.com adapun website: www.siwalimanews.com dengan syarat maksimal 4 (empat) halaman kuarto yang diketik dengan spasi rangkap lalu dikirim ke redaksi (koran Siwalima, senin 5 Desember 2022).

Berita yang diterbitkan oleh harian Siwalima biasanya akan diunggah di media lokal daring Siwalimanews.com. Di dalam siwalimanews.com sendiri terdiri

12 rubik. Rubik dalam siwalimanews.com yaitu daerah, politik, pendidikan, visi hukum, pemerintah, olahraga, opini, online, covid – 19 dan suplemen. Setiap rubik mempunyai berita yang berbeda – beda. Berikut penjelasan isi berita di setiap rubik terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rubik Siwalimanews.com

No	Rubik	Penjelasan
1	Kriminal	Memuat berita – berita tentang kriminalitas baik dalam konteks lokal maupun nasional
2	Daerah	Memuat daerah berita – berita daerah Maluku yang dicover oleh wartawan Siwalima yang ditempatkan di ibu kota kabupaten Se-Maluku, maupun visi pembangunan daerah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat / asal daerah yang ada di Kota Ambon.
3	Politik	Memuat berita – berita tentang politik di Maluku
4	Pendidikan	Memuat berita – berita tentang pendidikan di Maluku
5	Visi	Memuat opini dan materi visi ditetapkan pada redaktur
6	Hukum	Memuat berita tentang hukum dalam konteks lokal maupun Nasional
7	Pemerintahan	Memuat berita – berita tentang kegiatan pemerintahan di Maluku dan Nasional
8	Olahraga	Memuat berita tentang olahraga yang dianggap paling digemari oleh pembaca Siwalima, diantaranya sepak bola, tinju dan lainnya.
9	Berita	Memuat berita berisi tentang opini
10	Online	Memuat berita yang berkaitan dengan online
11	Covid-19	Memuat berita yang berkaitan dengan Covid-19
12	Suplemen	Memuat berita yang berkaitan dengan Covid-19

Sumber: <https://siwalimanews.com/> 28 Januari 2023

Berdasarkan pada tabel tersebut media online Siwalimanews.com lebih banyak menggunakan rubik hukum dan kriminal karena banyak konflik yang terjadi di Maluku tetapi tidak memungkinkan untuk rubik lainnya. Dalam pemberitaan diperlukan kritis dalam suatu peristiwa dan kreatif dalam menuliskan berita. Adapun penyedia komentar untuk para pembaca dengan menggunakan aplikasi

facebook, website yang sudah disediakan di platform Siwalimanews.com (lampiran 1, hal a).

Selanjutnya Siwalima memiliki visi dan misi untuk mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Siwalima ingin mendorong pembacanya agar menegakkan nilai – nilai demokrasi, menciptakan supremasi hukum dan hak – hak asasi manusia, melakukan pengawasan, kritis, koreksi dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan nilai – nilai keadilan dan kebenaran agar kedepannya tidak menyebabkan masalah dan konflik antara sesama masyarakat Maluku. Maka dari itu pemberitaan yang dimuat tidak sekedar memaparkan sesuatu peristiwa atau masalah apa adanya, tetapi siwalima juga ikut serta mengarahkan, menjabarkan, memperkayakan, dan berusaha semaksimal mungkin agar sesuatu masalah atau peristiwa berjalan, terjadi dan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Sebagaimana fungsi pers sebagai kekuatan tempat demokrasi di luar partai politik, parlemen, dan pemerintah, Siwalima ikut merwarna, bahkan terkadang memberi arah terhadap pembentukan public opinion (Lampiran 1, hal a).

Selain itu Siwalimanews mempunyai logo dalam logo tersebut mempunyai identitas dan artinya sendiri pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. Logo Siwalima



Sumber : <https://siwalimanews.com/> 28 Januari 2023

Makna logo : berdasarkan penjelasan dari Allan Lekeneny selaku redaktur pelaksana, Siwalima memiliki arti persaudaraan. Diambil dari bahasa daerah Maluku artinya mempersatukan, biar beberda rasa tau berbeda agama tetapi kita satu dalam keluarga .Warna merah dan biru dalam logo tersebut ialah warna merah yaitu jiwa keberanian, untuk kepentingan masyarakat masyarakat dan warna biru untuk perdamaian (Lampiran 1,hal b).

Dalam platform Siwalimanews.com terdapat struktur Siwalimanews.com yang terdiri dari delapan kepemimpinan dan yang paling banyak ada 5 orang kepemimpinan dalam suatu daerah, berikut susunan struktur Siwalimanews.com terdapat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Struktur Siwalimanews.com

No	Jabatan	Nama
1	Pemimpin Umum	Ongky M Louthenapessy
2	Pemimpin Perusahann	Batje Warlauw
3	Pemimpin Redaksi	Sherly Lootje Pattipawae
4	Redaktur Pelaksana	Franky Lekeny
5	Koordinator Liputan	Batje Warlau
6	Staff Redaksi	Febby Koenoe Gusti Riberu Lorenzo F. Soukotta Kres Manuputty
7	Daerah	Octavianus Kesaulya (Aru) Abdul Rasyid Ohorela (Buru) Stewart Toisutta (Masohi) Elvis Ch Lahalio (Buru Selatan) Abd. Wahab Siolimbona (SBT) Ibrahim Suneth (SBB) Adam Manutila (KTT)
8	Crompossing	Handri Mailoa
9	Produksi	Richard Tumalang (Kepala)
10	Redaktur Pelaksana Website	Allan Lekeneny

Sumber: Koran Siwalima, Senin 5 Desember 2022

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa redaktur pelaksana website dalam menjalankan tugasnya terdapat 11 wartawan dan 5 redaktur masing - masing dalam kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pemberitaan Siwalima terdapat 3 orang wawancara secara langsung seperti konflik sengketa tanah warga Tawiri dengan TNI AU dan 5 orang yang bertugas editor masing - masing setiap rubik yang ada di media Siwalimanews.com. Selanjutnya dalam pemilihan narasumber ada beberapa tahap proyeksi menampilkan materi di redaksi, tahapan materi dengan redaksi koordinator pelaksana mengisi harus ada narasumber yang meliput. Setiap hari Senin sampai Jumat bisa buat berita 40 pemberitaan di media Siwalima , kecuali hari Sabtu bisa membuat 20 pemberitaan di media Siwalimanews.com (lampiran 1,hal b).

Harga iklan yang dimiliki media cetak Siwalima bermacam – macam yaitu: iklan advertorial: FC dengan Rp. 7.000/mmk, BW: 4.000, iklan duka cita: 2.500, iklan baris harganya Rp 1.000 syarat minimum 2 baris dan maksimal 10 baris. Sedangkan tarif iklan dengan full color Rp. 12.000/mmk bisa melalui transaksi bank BNI 46 cabang Ambon lalu pengirim iklannya bisa melalui email: marketing@siwalimanews.com dicetak oleh PT Siwalima. Selain itu harga langganan koran Siwalima dalam kota Rp. 70.000 berbeda kota Ambon di tanggung sendiri ongkirnya (koran Siwalima, Senin 5 Desember 2022).

4.2. Konflik Sengketa Tanah Antara Warga Tawiri Dengan TNI AU

Tata letak dan administrasi Kota Ambon dengan luas daratan 359,45 km² dan luas lautan 17,55 km² dan panjang garis pantai 98 km. Wilayah Administratif

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 dengan luas 337 Km² atau 2/5 dari Luas Pulau Ambon. Sedangkan secara geografis, Kota Ambon terletak pada 3 34 8,40" - 3 47 42,00 Lintang Selatan dan 128 1 33,60 - 128 Bujur Timur, dengan batas - batas wilayah administrasi (ambon.go.id/keadaan-geografis) .

Secara topografi, Kota Ambon 87 % atau kurang lebih 280 Km² merupakan daerah bergelombang hingga terjal dan sisanya 13 % dengan luas kurang lebih 42 Km² merupakan daerah datar dari total keseluruhan wilayah daratan (ambon.go.id/keadaan-geografis) .

Selain itu Kota Ambon mengalami 2 iklim yaitu Iklim Tropis dan Iklim Musim. Pada iklim yang dialami oleh Kota Ambon ada dua yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Musim hujan yang terjadi pada bulan Desember sampai Maret yang dimana bulan April merupakan musim pancaroba peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Sedangkan Musim kemarau dari bulan Mei-Oktober dan musim peralihan dari musim kemarau sampai musim hujan ada pada bulan November (ambon.go.id/keadaan-geografis).

Kota Ambon memiliki lima (5) kecamatan yang terdiri dari tiga puluh (30) desa/ negeri dan dua puluh (20) kelurahan. Lima kecamatan tadi diantaranya : Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Leitimur Selatan, Baguala, Kecamatan Teluk Ambon. Selanjutnya dalam kecamatan masing - masing terdapat beberapa kelurahan seperti di Kecamatan Nusaniwe yaitu: Kelurahan Nusaniwe, Kelurahan Benteng, Kelurahan Wainitu, Kelurahan Kudamati, Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Urimesing, Kelurahan Waihaong, Kelurahan Seilale. Kelurahan

Waihoka, Kelurahan Karang Panjang, Kelurahan Batu Meja, Kelurahan Batu Gajah, Kelurahan Husein, Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Rijali, Kelurahan Amantelu, Kelurahan Pandan Kasturi merupakan terdapat di Kecamatan Sirimau, tetapi Kecamatan Leitimur tidak mempunyai kelurahan. Kecamatan Baguala mempunyai Kelurahan Lateri dan Kelurahan Tihu berada di Kecamatan Teluk Ambon.

Tidak hanya kelurahan yang berada di lima kecamatan tersebut tetapi ada beberapa desa di dalam lima kecamatan tersebut seperti Kecamatan Baguala terdapat beberapa desa yaitu : Desa Waiheru, Desa Nania, Desa Negeri Lama, Desa Latta. Kecamatan Teluk Ambon terdapat beberapa desa yaitu : Desa Wayawe, Desa Poka, Desa Hunuth / Durian Patah, tetapi Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Leitimur Selatan tidak mempunyai desa. Selain adanya desa adapun negeri, negeri yang paling banyak terdapat di Kecamatan Leitimur Selatan terdapat delapan desa yaitu : Desa Naku, Desa Kilang, Desa Hukurila, Desa Ema, Desa Hatalai, Desa Hutumuri, Desa Rutong, Desa Leahari. Selanjutnya yang disusul dengan 5 desa yang terdapat di Kecamatan Nusaniwe yaitu : Desa Latuhalat, Desa Seilale, Desa Amahusu, Desa Urimessing. Kecamatan Teluk Ambon yang terdapat 4 desa yaitu : Desa Laha, Desa Tawiri, Desa Hative Besar, Desa Rumah Tiga, desa yang paling sedikit yaitu terdapat 3 diantaranya : Desa Soya, Desa Batu Merah dan Desa Hative Kecil yang berada di Kecamatan Nusaniwe (Sumber: Andreas Pandiangan” Transformasi Saniri Negeri di Kota Ambon Mewujudkan Representasi Partisipatoris-Deliberatif, dalam Dewi, Y.T.N & Antonius, M. Laot Kian, 2021. Membangun Kota Inklusif Sebuah Antologi, Depok: PT. Rajagrafindo Persada).

Pada Negeri Tawiri yang terletak pada kecamatan Teluk Ambon terdiri dari tujuh kecamatan dan 1 Kelurahan yaitu : Desa Laha, Tawiri, Hative Besar, Wayame, Rumah Tiga, Poka, Desa Hunuth dan Kelurahan Tihu.

Perbedaan warga Desa Tawiri dengan Negeri Tawiri. Desa Tawiri lebih luas wilayahnya dari pada Negeri Tawiri. Selain itu juga Negeri Tawiri di pimpin oleh Raja sedangkan Desa Tawiri dipimpin oleh administrasi negara. Negeri Tawiri berteung Aminta Tutuhitu terletak di Pulau Ambon yang menyebabkan Tawiri adalah pecahan dari Negeri Laha.

Selanjutnya seorang Richard Louhenapessy sebagai kepala pemerintah yang menjalankan Kota Ambon dan telah menjabat selama dua periode yaitu yang pertama pada tahun 2011 - 2016 dan periode kedua pada tahun 2017 - 2022.

Pada tahun 2021, terjadinya sengketa tanah yang melibatkan desa Tawiri dengan TNI AU. Adanya kemungkinan satu pihak atau lebih yang mengklaim atas kepemilikan sebidang tanah menjadi miliknya, yang mana dari peristiwa tersebut menimbulkan sengketa tanah.

Bahwa konflik sengketa tanah antara Warga Tawiri dengan TNI AU hanyalah sebuah kesalahpahaman ketika dari pihak TNI AU mengukur tapal batas yang di mana pihak Warga Tawiri memblokir jalan menuju ke Bandara Internasional Pattimura karena diintimidasi oknum aparat TNI AU dengan mengancam warga untuk digusur sebanyak 250 hektar. Permasalahan dalam sertifikat nomor 6 tahun 2010 yang dibidang cacat oleh Warga Tawiri karena Warga Tawiri kaget melihat ada 209 hektar menjadi hak miliknya bukan hak pakai. Oleh

sebab itu pihak Warga Tawiri dan Komisi I DPRD meminta cabut sertifikat nomor 6 tahun 2010, akan tetapi pihak TNI AU mengklaim bahwa TNI AU sudah memiliki sertifikat hak milik sesuai dengan nomor 6 tahun 2010 dari BPN Kota Ambon milik pemerintah RI memilih Cq Kementrian Pertanahan RI dengan tercatat investasi kekayaan dengan nomor registrasi 50412000000001 dan nomor SIMAK 2.01.03.06.003.1 tidak hanya itu Komisi II DPRD meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan permasalahan sertifikat (www.dpr.go.id/berita). Padahal pihak TNI AU juga sedang menguasai tanah milik Negeri Laha.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor: 142/Pdt.G/PN.AB kornologi tersebut:

1. Tanggal 1 April 1953 terjadi surat pinjam pakai dari komandan Detasemen Utara Laha kepada Kepala Pemerintah Negeri Laha tentang Permohonan Pakai Tanah Negeri yang terjadi pada tiga wilayah yaitu Dusun Dati Waisane, tanah Dusun Dati Waimeteng dan Dusun Wailama
2. Tanggal 1 April 1954 – 1 April 1983 terhitung dari awal sampai akhir peminjaman tanah milik Negeri Laha guna membangun fasilitas militer
3. Tanggal 1 April 1983 Negeri Laha masih dikuasai oleh TNI AU yang masih belum dikembalikan oleh Negeri Laha dan meminta penyerahan tetapi tidak ditanggapi
4. Tanggal 21 Agustus 1975 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1995, bahwa PT. Angkasa Pura I menjadikan Bandara Pattimura sebagai asset atas dasar pinjam pakai tetapi hingga sekarang PT. Angkasa Pura I masih mengelolah lahan sengketa yang masih bertolak belakang dengan hukum

5. Tanggal 13 Juli 2009 tergugat TNI AU Pattimura Ambon objek sengketa Tanah Ulayat Laha yang dibenarkan oleh pengakuan dari Komandan Pangkuan TNI AU Pattimura Ambon Asep Chaerudin M.A.S.s. lewat surat pernyataan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/PSAP/V/
6. Tanggal 11 Oktober 2010 BPN menerbitkan sertifikat hak pakai nomor:06/Desa Laha dengan luas bidang a. 370.683 M2 dan b. 1.721.823.M2 dengan yang memegang hak tersebut ialah Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/ TNI AU tetapi, pemegang hak tidak berhak dan hak pakai tidak termasuk kepemilikan sebidang tanah, maka penerbitan sertifikat tidak sah
7. Tanggal 24 September 1958 Bandara Pattimura Ambon dimanfaatkan oleh PT. Angkasa Pura I bertentangan hukum adat yang mengenalnya adanya lembaga Rechtsverwerking sebagaimana dalam putusan MA RI np.210 K/Sip/1995 Demikian penguasaan 209 Ha pangkalan TNI AU Pattimura memiliki alasan hukum yang kuat dan melakukan perbuatan melawan hukum
8. Tanggal 29 Juni 2012 Upaya perdamaian melalui mediasi dengan merujuk Arifin SANI, SH hakim pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor: 142/Pdt.G/PN.AB dengan menimbang siding pemeriksaan dalam perkara yang dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Hj. Said Laturua,SE yang tidak akan merubah,menambah ataupun mengurangi gugatan
9. Tanggal 11 Oktober 2010 Tanah bekas Erfpacht nomor 5 Tanah Negara bekas Eigendom Verponding nomor 1804 telah diberikan alas hak oleh BPN berupa

hak pakai yang berdasarkan ketentuan UU no 1 Tahun 1958 yang dijadikan atas tanah berdasarkan bukti PTUN Ambon.

10. Tanggal 22 Oktober 2012 Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB, HJ. Said Latura, SE sebagai penggugat dan perwakilan dari Kepala Persekutuan masyarakat hukum adat Negeri Laga serta memberikan kuasa kepada Hamdani Latura, SH, dan Arifin Grisya,SH sebagai pengacara dan penasihat hukum berdasarkan surat kuasa melawan hukum tergugat 1. Pemerintah Negeri Hatu,2. TNI AU Lanud Pattimura Ambon, 3. PT. Angkasa Pura I Ambon dan 4. BPN Kota Ambon.

Negeri Laha sendiri sejak tahun 1314 mempunyai lahan 1.000 Ha dengan struktur budaya yang ada di sana dengan batas wilayah Negeri Laha yaitu : Negeri Seit di sebelah utara Negeri Laha, teluk Ambon di sebelah selatan Negeri Laha, Negeri Hative Besar di sebelah timur Negeri Laha, Negeri Hatu di sebelah barat Negeri Laha.

4.3. Analisis Berita Model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki

Peneliti melakukan analisis terhadap 6 berita dari media Siwalimanews.com tahun 2021 dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Berikut daftar 6 pemberitaan pada tabel 4.4. di bawah ini:

Tabel 4.4

Daftar Pemberitaan Konflik Sengketa Tanah Antara Warga Tawiri Dengan TNI AU

NO	Harian Siwalimanews.com	
	Harian Tanggal	Judul Berita
1	Jumat 21 Oktober 2021	BPN Dinilai Benturkan Warga Tawiri Dengan TNI AU
2	Kamis 30 September 2021	Ini Penjelasan Pihak Lanud Soal Lahan Tawiri

3	Kamis 30 September 2021	Warga Tawiri Juga Lapor DPR Maluku
4	Kamis 18 November 2021	Warga Kesal TNI AU dan BPN Tidak Hargai Panggilan DPRD
5	Rabu 24 November 2021	Wenno Minta TNI AU Arif dan Bijaksana
6	Kamis 25 November 2021	Jalan Bandara Diblokir Warga
7	Kamis 3 Desember 2021	Sengketa Lahan Tawiri Masih Dibahas

Sumber: Siwalimanews.com

Dari tabel tersebut setelah dianalisis ternyata mendapatkan 2 judul berita yang sama dengan kalimat yang sama sehingga dari 7 judul pemberitaan yang ada di media Siwalimanews.com tentang konflik sengketa tanah antara Warga Tawiri dengan TNI AU terdapat 5 judul pemberitaan yang di analisis pada tabel 4.5. di bawah ini.

Tabel 4.5

Daftar Pemberitaan Konflik Sengketa Tanah Antara Warga Tawiri Dengan TNI AU

NO	Harian Siwalimanews.com	
	Harian Tanggal	Judul Berita
1	Jumat 21 Oktober 2021	BPN Dinilai Benturkan Warga Tawiri Dengan TNI AU
2	Kamis 30 September 2021	Warga Tawiri Juga Lapor DPR Maluku
3	Kamis 18 November 2021	Warga Kesal TNI AU dan BPN Tidak Hargai Panggilan DPRD
4	Rabu 24 November 2021	Wenno Minta TNI AU Arif dan Bijaksana
5	Kamis 25 November 2021	Jalan Bandara Diblokir Warga

Sumber: Siwalimanews.com

1. FP 1

Berita Jumat 21 Oktober 2021 dengan judul berita :

“BPN Dinilai Benturkan Warga Tawiri Dengan TNI AU”

(1)AMBON, Siwalimanews – BPN Kota Ambon jangan benturkan warga Tawiri dengan pihak TNI-AU. (2) Sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 dinilai cacat hukum.

(3)Komisi I DPRD Kota Ambon meminta BPN Kota Ambon mencabut sertifikat tersebut, apalagi, pihak BPN mengaku tidak pernah melakukan pengembalian batas dan pengukuran, sehingga sertifikat itu tidaklah benar.

(4)“Ketika kita rapat, kita tanyakan kepada BPN mengenai prosedur lahirnya sertifikat Nomor: 6 tahun 2010 misalnya harus ada pengukuran dan diketahui oleh pihak negeri namun dari negeri Tawiri mengaku tidak pernah dilakukan pengukuran atau pengembalian batas,” tandas Ketua Komisi I Zeth Pormes usai melakukan rapat bersama ratusan warga Tawiri, di Baileo Rakyat Belakang Soya Senin(18/10).

(5) Politisi Partai Golkar ini menilai, semua prosedur lahirnya sertifikat Nomor: 6 sesuai keterangan BPN, tidak pernah dilakukan, maka Komisi I memutuskan, bahwa sertifikat ini cacat secara hukum.

(6) “Kita tidak tahu tiba-tiba sertifikat ini muncul dan yang ironisnya di dalam sertifikat 209 hektar Nomor: 6 tahun 2010 sudah ada 50 rumah yang sudah memiliki sertifikat hak milik, bukan hak pakai, lalu bagaimana sertifikat hak pakai bisa timbul di dalam lokasi yang ada hak milik orang,” tandasnya.

(7) Itu berarti kata Pormes, dari pihak BPN sepertinya ada yang tidak beres, sehingga, sertifikat Nomor: 6 di atas tanah 209 hektar harus dicabut.

(8)“Lembaga ini mencari keadilan, baik itu dari rakyat Tawiri atau pihak manapun. Bagaimana kita mau menopang sebuah keadilan dalam proses kita letakan undang-undang sebagai dasar konstitusional dan normatif terhadap sertifikat Nomor 6 tahun 2010,” cetusnya.

(9)Oleh karena itu, adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan baik itu kepada Pemkot Ambon maupun TNI AU, bahkan dari Pihak BPN, yakni, meminta Pemkot Ambon melarang semua pihak, termasuk TNI AU untuk tidak mengintimidasi masyarakat dan melakukan pelanggaran terhadap kios- kios dan usaha masyarakat sampai ada kepastian hukum.

(10)“Kita meminta pihak BPN mencabut sertifikat Nomor 6 tahun 2010, karena cacat prosedur. Bagaimana BPN mengeluarkan sertifikat dan mengakui tidak pernah lakukan pengukuran,“ pungkasnya.

TNI-AU Klaim Miliknya

(11)Pendataan yang dilakukan Pangkalan TNI AU Pattimura pada wilayah di Negeri Tawiri, sebagai bentuk pengamanan aset negara yang dikuasakan TNI AU kepada Lanud Patti-mura, terhadap bangunan-bangunan yang menempati lahan tersebut.

(12)“Pengamanan aset negara Cq Lanud Pattimura di Negeri Tawiri dilaksanakan dengan persuasif dan humanis,” ungkap Kepala Penerangan Lanud Pattimura, Letda Sus Yogi Tri santoso dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (30/9).

(13)Saat itu, Lanud Pattimura membagikan surat pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang berada di lokasi tersebut, yang telah menempati secara ilegal terhadap aset negara.

(14) Pangkalan TNI AU Pattimura memiliki sertifikat hak pakai Nomor 6 tahun 2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon milik Peme-rintah RI Cq Kementerian Pertahanan RI, dan sebagai pengguna, TNI AU, dan tercatat di inventaris kekayaan negara dengan nomor registrasi 50412000000001 dan nomor SIMAK 2.01.03.06.003.1.

(15) Untuk itu, pihak Lanud Pattimura menghimbau kepada warga yang menempati lahan tersebut untuk segera melapor ke Lanud, agar dilakukan pendataan lebih lanjut.

(16) Pengamanan aset yang dilakukan oleh Lanud Pattimura juga, berdasarkan Surat Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III No: B/270/IV/2021 perihal Penyelesaian Permasalahan Aset di Lanud Pattimura tertanggal 14 April 2021, kepada Komandan Lanud Pattimura yang berisikan, agar Danlanud Pattimura melakukan patroli secara rutin dan dipimpin, karena TNI AU sudah menguasai aset yang disertai dokumen pembuktian yang kuat.

(17) “Apabila ada warga yang menempati/membangun diatas lahan TNI AU Cq Lanud Pattimura, maka warga tersebut dilaporkan secara pidana, yaitu tindak pidana penyerebotan aset negara kepada kepolisian,” jelas Letda Sus Yogi.

(18) Menindaklanjuti instruksi dari Pangkoopsau III sebagai induk komando dari Lanud Pattimura kata Letda Sus Yogi, maka pihak Lanud Pattimura saat ini sedang melak-sanakan pengamanan aset dengan pendataan dan penandatanganan surat pernyataan bagi masyarakat yang menempati aset tanah negara tersebut.

(19) Pengamanan aset tersebut, bu-kanlah untuk melakukan penggu-suran, melainkan sebagai pendataan terhadap warga yang menduduki aset tanah negara tersebut.

(20) “Bagi warga yang telah mendiri-kan bangunan di aset tanah TNI AU Cq. Lanud Pattimura, pendataan tersebut sebagai bentuk informasi, apabila suatu hari aset tanah ter-sebut akan digunakan untuk kepen-tingan pemerintah daerah atau per-tahanan, masyarakat yang bermukim di aset tanah TNI AU Cq. (21) Pattimura tidak kaget lagi, sehingga mereka memiliki pemahaman dan persiapan sejak dini,” jelas Letda Sus Yogi.

(22) Terkait kegiatan pengamanan aset Pangkalan TNI AU Pattimura lanjut Letda Sus Yogi, sebelumnya tim aset Lanud Pattimura sudah berkoor-dinasi dengan Gubernur Provinsi Maluku dan disetujui penertiban aset milik Lanud Pattimura sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

(23) “Selain itu, koordinasi juga sudah dilakukan dengan Kajati Maluku, Walikota Ambon, dan Kapolres Ambon, yang pada intinya sepakat akan selalu mendukung langkah Lanud Pattimura dalam meng-amankan aset tanah negara tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan Kejati Maluku, Walikota Ambon, dan Kapolres Ambon, yang pada intinya sepakat akan selalu mendukung langkah Lanud Pattimura dalam meng-amankan aset tanah negara tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” beber Letda Sus Yogi.

(24)Merunut kembali sejarahnya, dalam rangka kegiatan operasional latihan TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura sekaligus untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, yang pada tahun 1950 baru saja merdeka dan masih rawan dengan upaya pen-jajahan kembali oleh bangsa Jepang maupun bangsa Belanda ketika itu, maka Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) melalui Surat Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950, telah menginstruksikan kepada TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura untuk menguasai lapangan-lapangan terbang, bangunan-bangunan dan alat-alat yang berada di lapangan terbang tersebut.

(25) Dengan demikian pemeliharaan lapangan-lapangan tersebut menjadi tanggungjawab TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura, sebagai benteng pertahanan untuk menjaga kedaulatan NKRI, maka TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura telah diberikan kuasa penuh oleh negara untuk menguasai secara fisik wilayah pertanahan, dimana keberadaan Pangkalan TNI AU Pattimura, di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

(26)Pada perkembangan selanjutnya, terhadap penguasaan fisik tanah di Desa Laha dan sebagian Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon oleh TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah Pendudukan Jepang.

(27) “Di dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Jepang dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia, sehingga menjadi dasar bagi TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura yang telah diberikan hak oleh negara untuk menguasai aset tanah yang berada di Desa Laha dan sebagian Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia,” tuturnya.

(28) Kemudian dari Mendagri sesuai S.E. No.Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 yang berisi tentang penyelesaian permasalahan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pendudukan Jepang serta batas waktu penyelesaian tanah tersebut, dengan batas waktu berakhir pada akhir tahun 1953. (29) Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 dan Nomor 3738 K/Pdt/1987 tanggal 14 Februari 1990 menentukan antara lain diatas tanah yang pernah diterbitkan hak eropa misalnya Opstal, Erpacht, Eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya, misalnya “hak tanah adat, logika hukumnya ketika di atas tanah tersebut terbit hak-hak eropa, maka “penguasaan” masyarakat hukum adat “lepas/tidak dapat dikuasai” lagi.

(30) Dengan berlakunya Undang-Undang Pertanahan setelah hak-hak tersebut habis atau konversinya habis, maka tanah menjadi tanah negara, sehingga diputuskan oleh negara, bahwa tanah di Desa Laha seluas 209,25 Ha diberikan penguasaannya kepada TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura untuk dijadikan sebagai area kegiatan operasional pertahanan negara demi menjaga kedaulatan NKRI.

(31) Oleh karena itu, sejak saat itu secara administrasi dan legal berdasarkan hukum yang berlaku, TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura resmi menguasai secara fisik tanah negara tersebut. (S-51)

Tabel 4.4.
Pemberitaan 1 “BPN Dinilai Benturkan Warga Tawiri Dengan TNI AU”

Kalimat	Aspek	Keterangan
K1	Proposisi	BPN Kota Ambon jangan benturkan Warga Tawiri
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang terjadi dalam pemberitaan konflik sengketa tanah Warga Tawiri dengan BPN Kota Ambon? terhadap BPN Kota Ambon jangan benturkan warga Tawiri dengan pihak TNI-AU? Siapa yang berkepentingan ? antara warga Tawiri dengan pihak TNI AU
	Tematik	-
	Retoris	Benturkan
K2	Proposisi	Sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 dinilai cacat hukum
	Sintaksis	-
	Skrip	Berapakah nomor sertifikat ?Sertifikat Nomor 6 Tahun 2010 dinilai cacat hukum.
	Tematik	-
	Retoris	Cacat hukum
K3	Proposisi	pihak BPN mengaku tidak pernah melakukan pengembalian batas dan pengukuran, sehingga sertifikat itu tidaklah benar
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapakah yang meminta Kota Ambon mencabut sertifikat? Komisi I DPRD Kota Ambon meminta BPN Kota Ambon mencabut sertifikat Apa yang terjadi? Komisi I DPRD Kota Ambon meminta mencabut sertifikat
	Tematik	-
	Retoris	Mencabut
K4	Proposisi	-
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Siapakah yang bertanya kepada BPN mengenai prosedur lahirnya sertifikat nomor 6 tahun 2010 ? Ketua Komisi I Zeth Apa yang terjadi? Ketua Komisi I mengatakan Warga Tawiri tanyakan kepada BPN mengenai prosedur lahirnya sertifikat Nomor: 6 tahun 2010 misalnya harus ada pengusulan dan diketahui oleh pihak negeri namun dari Negeri Tawiri mengaku tidak pernah dilakukan pengukuran atau pengembalian batas Pormes

Kalimat	Aspek	Keterangan
		Kapan proses itu terjadi? usai melakukan rapat bersama ratusan warga Tawiri, di Baileo Rakyat Belakang Soya Senin(18/10).
	Tematik	Mengenai prosedur lahirnya sertifikat Nomor 6 tahun 2010 harus ada pengusulan dan di ketahui pihak negeri namun Negeri Tawiri tidak dilakukan pengukuran
	Retoris	-
K5	Proposisi	-
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapakah yang menilai prosedur lahirnya sertifikat nomor 6 sesuai keterangan BPN tidak pernah dilakukan berarti sertifikat itu cacat secara hukum ? Komisi I Zeth Promes dan Partai Golkar
	Tematik	Sertifikat nomor 6 tidak pernah dilakukan maka sertifikat tersebut cacat secara hukum
	Retoris	Lahirnya, cacat secara hukum
K6	Proposisi	“Kita tidak tahu tiba-tiba sertifikat ini muncul dan yang ironisnya di dalam sertifikat 209 hektar Nomor: 6 tahun 2010 sudah ada 50 rumah yang sudah memiliki sertikat hak milik, bukan hak pakai, lalu bagaimana sertifikat hak pakai bisa timbul di dalam lokasi yang ada hak milik orang,” tandasnya.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	-
	Tematik	Sertifikat 209 hektar nomor6 tahun 2010 sudah ada 50 rumah yang sudah memiliki sertifikat hak milik bukan hak pakai lalu sertifikat hak pakai bisa timbul di dalam lokasi yang ada hak milik orang
	Retoris	Kita, ironis, 209 hektar, sudah ada 50 rumah
K7	Proposisi	-
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapakah pihak BPN tidak ada yang beres mengenai sertifikat nomor 6 di atas tanah 209 hektar harus dicabut? Pormes Komisi I dari pihak BPN
	Tematik	Pihak BPN sepertinya tidak ada yang beres sehingga sertifikat Nomor 6 di atas tanah 209 hektar harus dicabut
	Retoris	Dicabut
K8	Proposisi	“Lembaga ini mencari keadilan, baik itu dari rakyat Tawiri atau pihak manapun. Bagaimana kita mau menopang sebuah keadilan dalam proses kita letakan undang-undang sebagai dasar konstitusional dan normatif terhadap sertifikat Nomor 6 tahun 2010,” cetusnya
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Siapakah yang mencari keadilan ? lembaga ini mencari keadilan, baik itu dari rakyat Tawiri atau pihak manapun. Bagaimana kita mau menopang sebuah keadilan dalam proses kita letakan undang-undang sebagai dasar

Kalimat	Aspek	Keterangan
		konstitusional dan normatif terhadap sertifikat Nomor 6 tahun 2010?
	Tematik	-
	Retoris	kita, konstitusional dan normatif
K9	Proposisi	Meminta Pemkot Ambon melarang semua pihak, termasuk TNI AU untuk tidak mengintimidasi masyarakat dan melakukan pelarangan terhadap kios- kios dan usaha masyarakat sampai ada kepastian hukum
	Sintaksis	-
	Skrip	Berapa orang yang rekomendasi meminta Pemkot Ambon melarang semua pihak termasuk TNI AU untuk tidak mengintimidasi masyarakat dan melakukan pelarangan terhadap kios- kios dan usaha masyarakat sampai ada kepastian hukum ? Pemkot Ambon maupun TNI AU, bahkan dari Pihak BPN
	Tematik	oleh karena rekomendasi yang disampaikan baik itu kepada Pemkot Ambon maupun TNI AU, bahkan dari Pihak BPN, yakni, meminta Pemkot Ambon melarang semua pihak, termasuk TNI AU untuk tidak mengintimidasi masyarakat
	Retoris	-
K10	Proposisi	“Kita meminta pihak BPN mencabut sertifikat Nomor 6 tahun 2010, karena cacat prosedur. Bagaimana BPN mengeluarkan sertifikat dan mengakui tidak pernah lakukan pengukuran,” pungkasan.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Mengapa pihak BPN mencabut sertifikat Nomor 6 tahun 2010 ?karena cacat prosedur. Bagaimana BPN mengeluarkan sertifikat dan mengakui tidak pernah lakukan pengukuran?
	Tematik	Pihak BPN mencabut sertifikat Nomor 6 tahun 2010 karena cacat prosedur
	Retoris	kita, cacat prosedur
K11	Proposisi	Pendataan yang dilakukan Pangkalan TNI AU Pattimura pada wilayah di Negeri Tawiri, sebagai bentuk pengamanan aset negara yang dikuasakan TNI AU kepada Lanud Pattimura, terhadap bangunan-bangunan yang menempati lahan tersebut
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dilakukan Pangkalan TNI AU Pattimura pada wilayah di Negeri Tawiri, sebagai bentuk pengamanan aset negara yang di-kuasakan TNI AU kepada Lanud Patti-mura, terhadap bangunan-bangunan yang menempati

Kalimat	Aspek	Keterangan
		lahan tersebut? Dengan melakukan pendataan yang dilakukan Pang-kalan TNI AU Pattimura pada wila-yah di Negeri Tawiri
	Tematik	-
	Retoris	-
K12	Proposisi	“Pengamanan aset negara Cq Lanud Pattimura di Negeri Tawiri dilaksanakan dengan persuasif dan humanis,” ungkap Kepala Penera-ngan Lanud Pattimura, Letda Sus Yogi Tri
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Siapakah pengamanan aset negara Cq Lanud Pattimura di Negeri Tawiri yang dilaksanakan dengan persuasif dan humanis? Kepala Penera-ngan Lanud Pattimura, Letda Sus Yogi Tri santoso dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (30/9).
	Tematik	-
	Retoris	-
K13	Proposisi	Lanud Pattimura mem-bagikan surat pemberitahuan kepa-da masyarakat sekitar yang berada di lokasi tersebut, yang telah me-nempati secara ilegal terhadap aset negara
	Sintaksis	Konteks
	Skrip	Siapa yang membagi surat pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang berada di lokasi telah menempati secara ilegal terhadap aset negara? Lanud Pattimura
	Tematik	-
	Retoris	Ilegal,aset negara
K14	Proposisi	Pangkalan TNI AU Pattimura memiliki sertifikat hak pakai Nomor 6 tahun 2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon milik Peme-rintah RI Cq Kementerian Pertahanan RI, dan sebagai pengguna, TNI AU, dan tercatat di inventaris kekayaan negara dengan nomor registrasi 50412000000001 dan nomor SIMAK 2.01.03.06.003.1
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapakah memiliki sertifikat hak pakai Nomor 6 tahun 2010 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon milik Peme-rintah RI Cq Kementerian Pertahanan RI, dan sebagai pengguna, TNI AU, dan tercatat di inventaris kekayaan negara dengan nomor registrasi 50412000000001 dan nomor SIMAK 2.01.03.06.003.1? Pangkalan TNI AU
	Tematik	-
	Retoris	-
K15	Proposisi	Pihak Lanud Pattimura menghimbau kepada warga yang menempati lahan tersebut untuk segera melapor ke Lanud, agar dilakukan pendataan lebih lanjut
	Sintaksis	-

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Skrip	Untuk apa pihak Lanud Pattimura menghimbau kepada warga yang menempati lahan tersebut untuk segera melapor ke Lanud? agar dilakukan pendataan lebih lanjut.
	Tematik	Pihak Lanud Pattimura menghimbau warga yang menempati untuk segera melapor agar dilakukan pendataan lebih lanjut
	Retoris	-
K16	Proposisi	Lanud Pattimura juga, berdasarkan Surat Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III No: B/270/IV/2021 perihal Penyelesaian Permasalahan Aset di Lanud Pattimura tertanggal 14 April 2021, kepada Komandan Lanud Pattimura yang berisikan, agar Danlanud Pattimura melakukan patroli secara rutin dan dipimpin, karena TNI AU sudah menguasai aset yang disertai dokumen pembuktian yang kuat
	Sintaksis	-
	Skrip	<p>Bagaimana pengamanan aset yang dilakukan oleh Lanud Pattimura ? berdasarkan Surat Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara III No: B/270/IV/2021 perihal Penyelesaian Permasalahan Aset di Lanud Pattimura</p> <p>Pada tanggal berapa ? 14 April 2021</p> <p>Kepada siapakah yang berisikan agar Danlanud Pattimura melakukan patrol secara rutin dan dipimpin? Komandan Lanud Pattimura</p> <p>Mengapa itu bisa terjadi? karena TNI AU sudah menguasai aset yang disertai dokumen pembuktian yang kua</p>
	Tematik	-
	Retoris	-
	Proposisi	Warga yang menempati/membangun diatas lahan TNI AU Cq Lanud Pattimura, maka warga tersebut dilaporkan secara pidana, yaitu tindak pidana penyerobotan aset negara kepada kepolisian
K17	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang terjadi warga jika menempati/membangun diatas lahan TNI AU Cq Lanud Pattimura? maka warga tersebut dilaporkan secara pidana, yaitu tindak pidana penyerobotan aset negara kepada kepolisian kata Letda Sus Yogi
	Tematik	-
	Retoris	Pidana,warga, aset negara
K18	Proposisi	Instruksi dari Pangkoopsau III sebagai induk komando dari Lanud Pattimura kata Letda Sus Yogi, maka pihak Lanud

Kalimat	Aspek	Keterangan
		Pattimura saat ini sedang melak-sanakan pengamanan aset dengan pendataan dan penandatanganan surat pernyataan bagi masyarakat yang menempati aset tanah negara tersebut
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa saja yang menindaklanjuti instruksi tersebut? Pangkoopsau III sebagai induk komando dari Lanud Pattimura Apa yang dilakukan oleh Pihak Lanud Pattimura? sedang melak-sanakan pengamanan aset dengan pendataan dan penandatanganan surat pernyataan bagi masyarakat yang menempati aset tanah negara tersebut
	Tematik	Untuk menindak lanjutin dari Pangkoopsau III sebagai induk komando maka pihak Lanud Pattimura melaksanakan pengamanan aset dengan pendataan dan penandatanganan surat pernyataan bagi masyarakat yang menempati aset tanah negara
	Retoris	-
K19	Proposisi	Pengamanan aset tersebut, bu-kanlah untuk melakukan penggu-suran, melainkan sebagai pendataan terhadap warga yang menduduki aset tanah negara tersebut
	Sintaksis	-
	Skrip	Pengamanan aset bukan untuk melakukan penggusuran melainkan untuk apa? sebagai pendataan terhadap warga yang menduduki aset tanah negara
	Tematik	Pengamanan aset bukanlah melakukan penggusuran melainkan sebagai pendataan terhadap warga
	Retoris	-
K20	Proposisi	“Apabila suatu hari aset tanah ter-sebut akan digunakan untuk kepen-tingan pemerintah daerah atau per-tahanan, masyarakat yang bermukim di aset tanah TNI AU Cq”
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Mengapa dilakukan untuk menggunakan pendataan? Karena apabila suatu hari aset tanah ter-sebut akan digunakan untuk kepen-tingan pemerintah daerah atau per-tahanan, masyarakat yang bermukim di aset tanah TNI AU Cq tidak kaget
	Tematik	Bagi warga Tawiri yang telah mendirikan bangunan aset tanah TNI AU Cq Lanu Pattimura harus melakukan pendataan apabila digunakan tidak kaget
	Retoris	-
K21	Proposisi	“Pattimura tidak kaget lagi, sehingga mereka memiliki pemahaman dan persiapan sejak dini jelas” Letda Sus Yogi
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	-
	Tematik	Dilakukannya pendataan dalam aset tanah sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman
	Retoris	-

Kalimat	Aspek	Keterangan
K22	Proposisi	Tim aset Lanud Pattimura sudah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Maluku dan disetujui penertiban aset milik Lanud Pattimura sudah sesuai aturan hukum yang berlaku
	Sintaksis	-
	Skrip	<p>Apa yang direncanakan oleh Letda Sus Yogi? Terkait kegiatan pengamanan aset Pangkalan TNI AU Pattimura lanjut Letda Sus Yogi, sebelumnya tim aset Lanud Pattimura sudah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Maluku dan disetujui penertiban aset milik Lanud Pattimura sudah sesuai aturan hukum yang berlaku</p> <p>Siapa yang sedang berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Maluku? Tim aset Lanud Pattimura</p>
	Tematik	-
	Retoris	-
	K23	Proposisi
K23	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	<p>Selain Lanud Pattimura siapa lagi yang berkoordinasi mengenai penertiban? Kajati Maluku, Walikota Ambon, dan Kapolres Ambon</p> <p>Mereka Kajati Maluku, Walikota Ambon dan Kapolres Ambon sedang melakukan apa? intinya sepakat akan selalu mendukung langkah Lanud Pattimura dalam mengamankan aset tanah negara tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku</p>
	Tematik	-
	Retoris	-
	K24	Proposisi
K24	Sintaksis	
	Skrip	<p>Siapa yang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, yang pada tahun 1950 baru saja merdeka dan masih rawan dengan upaya penjajahan kembali oleh bangsa Jepang maupun bangsa Belanda? Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP)</p> <p>Apa yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Perang KSAP? melalui Surat Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950, telah menginstruksikan kepada TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura untuk menguasai lapangan-</p>

Kalimat	Aspek	Keterangan
		lapan-angan terbang, bangunan-bangunan dan alat-alat yang berada di lapan-angan terbang tersebut.
	Tematik	Maka
	Retoris	-
K25	Proposisi	AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura telah diberikan kuasa penuh oleh negara untuk menguasai secara fisik wilayah pertanahan, dimana keberadaan Pangkalan TNI AU Pattimura, di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
	Sintaksis	
	Skrip	Siapa yang menjadi pemeliharaan lapangan – lapangan menjadi tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan NKRI? TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura Tempat keberadaan pangkalan TNI AU Pattimura di mana? Di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
	Tematik	Menjadi tanggung jawab TNI AU pangkalan TNI AU Pattimura maka TNI AU Cq pangkalan TNI AU Pattimura diberikan kuasa penuh oleh negara
	Retoris	-
K26	Proposisi	penguasaan fisik tanah di Desa Laha dan sebagian Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon oleh TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah Pendudukan Jepang.
	Sintaksis	Konteks
	Skrip	Pada tanggal berapa Mendagri mengeluarkan Surat edaran Nomor H.20/5/7 ? tanggal 9 Mei 1950 Siapa yang menguasai fisik tanah Desa Laha dan sebagian Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon? TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura
	Tematik	-
	Retoris	-
K27	Proposisi	TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura yang telah diberikan hak oleh negara untuk menguasai aset tanah yang berada di Desa Laha dan sebagian Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia
	Sintaksis	Konteks
	Skrip	Kepada siapa hak diberikan oleh negara untuk menguasai aset tanah yang berada di Desa Laha dan sebagian Desa Tawiri dalam melaksanakan kegiatan operasional menjaga kedaulatan? TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura
	Tematik	Tanah yang diambil oleh pemerintah Jepang dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia sehingga menjadi

Kalimat	Aspek	Keterangan
		dasar bagi TNI AU Pangkalan TNI AU Pattimura yang diberikan hak oleh negara untuk menguasai tanah yang berada di Desa Laha
	Retoris	-
K28	Proposisi	Mendagri sesuai S.E. No.Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 yang berisi tentang penyelesaian permasalahan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pendudukan Jepang serta batas waktu penyelesaian tanah tersebut, dengan batas waktu berakhir pada akhir tahun 1953
	Sintaksis	-
	Skrip	Pada tanggal berapa tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dahulu diambil oleh penduduk Jepang dan batas waktu penyelesaian sesuai nomor berapa? Mendagri sesuai S.E. No Agr/40/25/13 tanggal 13 Mei 1953
	Tematik	-
	Retoris	-
K29	Proposisi	putusan Mahkamah Agung Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 dan Nomor 3738 K/Pdt/1987 tanggal 14 Februari 1990 menentukan antara lain diatas tanah yang pernah diterbitkan hak eropa misalnya Opstal, Erfpacht, Eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya, misalnya “hak tanah adat, logika hukumnya ketika di atas tanah tersebut terbit hak-hak eropa, maka “penguasaan” masyarakat hukum adat “lepas/tidak dapat dikuasa
	Sintaksis	Konteks
	Skrip	Pada tanggal dan nomor berapa menentukan hak eropa? Putusan Mahkamah Agung Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 dan Nomor 3738 K/Pdt/1987 tanggal 14 Februari 1990 Apa saja yang diterbitkan oleh hak eropa? Opstal, Erparch,Eigendom Berisi apa hak itu? Opstal, Erfpacht, Eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya, misalnya “hak tanah adat, logika hukumnya ketika di atas tanah tersebut terbit hak-hak eropa, maka “penguasaan” masyarakat hukum adat “lepas/tidak dapat
	Tematik	Hak tanah adat logika hukumnya ketika tanah tersebut terbit maka masyarakat hukum adat tidak dapat dikuasai
	Retoris	Opstal, Erpacht, Eigendom

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Sintaksis	-
	Skrip	Seberapa banyak yang diberikan penguasaannya kepada TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura sebagai area kegiatan operasional pertahanan negara? 209,25 Ha
	Tematik	Undang – undang Pertanahan setelah haknya habis maka tanah menjadi tanah negara sehingga diputuskan bahwa tanah di Desa Laha seluas 209,25 Ha diberikan penguasaannya kepada TNI AU Cq
	Retoris	-
K31	Proposisi	administrasi dan legal berdasarkan hukum yang berlaku, TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura resmi menguasai secara fisik tanah negara tersebut
	Sintaksis	-
	Skrip	-
		Kenapa TNI AU Cq Pangkalan TNI AU resmi menguasai secara fisik tanah negara? Karena secara administrasi dan legal berdasarkan hukum yang berlaku
	Tematik	Oleh karena secara administrasi dan legal berdasarkan hukum yang berlaku, TNI AU Cq Pangkalan TNI AU Pattimura resmi menguasai secara fisik tanah negara
	Retoris	-

FP 2

Berita tanggal Kamis 30 September 2021 dengan judul berita:

“Warga Tawiri Juga Lapor DPR Maluku”

(1)AMBON, Siwalimanews – Setelah menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat di Baileo Rakyat Belakang Soya, ratusan warga Negeri Tawiri juga mengadakan hal yang sama di DPRD Maluku.

(2)Pantauan Siwalimanews, ratusan warga ini menyambangi Baileo Rakyat Karang Panjang sejak pukul 13.30 WIT sambil membawa pamflet yang bertuliskan tolong perhatikan hak kami, kami butuh perlindungan, Bpk Jokowi Kami butuh ketenangan, Jangan rampas hak dari kami, lindungi hak ulayat kami, kami butuh perlindungan dari pemerintah.

(3)Koordinator aksi Arry Latulola dalam orasinya menegaskan, puluhan tahun sejak ia lahir, masyarakat Tawiri telah menempati tanah tersebut, tetapi sekarang hendak digusur oleh pihak TNI AU.

(4)“Mereka berperkara dengan Pemerintah Negeri Laha dan mereka menang, tapi mengapa tanah orang Tawiri yang mau diambil,” teriak Arry.

(5)Menurutnya, pihak TNI AU mengklaim memiliki hak atas tanah dengan dasar sertifikasi hak pakai tahun 2010 seluas 250 hektar, tetapi tidak pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.

(6) Bahkan lebih sadisnya lagi kata Arry, warga Tawiri setiap malam diintimidasi oleh oknum-oknum dari TNI AU dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan jika tanah yang didiami mereka adalah tanah milik TNI AU.

(7) “Sadisnya lagi, kami diintimidasi dari bulan Juli sampai saat ini dan akhirnya kemarin kami tutup jalan menuju ke Bandara. (8) Bayangkan dari TNI AU dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan jika tanah yang didiami mereka adalah tanah milik TNI AU.,” bebrnya.

(9) Tak hanya itu, salah satu perwira TNI AU datang dan mengatakan, jika tindakan yang dilakukan TNI AU atas koordinasi dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy. (10) Selain itu, pihak TNI AU juga melarang pembangunan yang bersumber dari aspirasi anggota DPRD Fraksi Gerindra, karena mereka mengklaim tanah tersebut milik TNI AU.

(11) Setelah berotasi selama beberapa menit, ratusan warga Tawiri ini kemudian ditemui Wakil Ketua DPRD Melkianus Sairdeket didampingi anggota Komisi II Halimun Saulatu.

(12) Di depan warga Tawiri, Sairdeket berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Maluku.

(13) “Nanti persoalan sengketa tanah ini akan disampaikan ke Komisi I untuk membantu mencari solusi terkait keluhan warga Negeri Tawiri ini,” janji Sairdeket.

(14) Menurutnya, Komisi I DPRD Maluku akan mengundang semua pihak, baik itu Pemerintah Negeri Tawiri, Pihak TNI AU, dan perwakilan masyarakat, guna mendapatkan solusi atas masalah yang tengah dihadapi.

(15) Usai mendengarkan penjelasan Sairdeket, ratusan warga ini kemudian membubarkan diri secara tertib meninggalkan Baileo Rakyat Karang Panjang. (S-50)

Tabel 4.5.

Pemberitaan 2 “Warga Tawiri Juga Lapor DPR Maluku”

Kalimat	Aspek	Keterangan
K1	Proposisi	Ratusan warga Negeri Tawiri menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat di Baileo Rakyat Belakang Soya
	Sintaksis	
	Skrip	Siapa yang menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat di Baileo Rakyat Belakang Soya ? Warga Negeri Tawiri Dimana tempatnya? di Baileo Rakyat Belakang Soya
	Tematik	-
	Retoris	Mengadukan

Kalimat	Aspek	Keterangan
K2	Proposisi	ratusan warga ini menyambangi Baileo Rakyat Karang Panjang sejak pukul 13.30 WIT sambil membawa pamflet yang bertuliskan tolong perhatikan hak kami, kami butuh perlindungan, Bpk Jokowi Kami butuh ketenangan, Jangan rampas hak dari kami, lindungi hak ulayat kami, kami butuh perlindungan dari pemerintah
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang membawa pamphlet? Ratusan warga Di mana tempatnya? Di Baileo Rakyat Panjang Pada pukul berapa kah ? pukul 13.30 WIT Apa yang dilakukan Warga Tawiri ? sambil membawa pamflet yang bertuliskan tolong perhatikan hak kami, kami butuh perlindungan, Bpk Jokowi Kami butuh ketenangan, Jangan rampas hak dari kami, lindungi hak ulayat kami, kami butuh perlindungan dari pemerintah
	Tematik	-
	Retoris	Ratusan warga, Menyambangi, rampas, ulayat, panflet
K3	Proposisi	Aksi Arry Latulola dalam masyarakat Tawiri telah menempati tanah tersebut, tetapi sekarang hendak digusur oleh pihak TNI AU
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa warga Tawiri yang telah menempati tanah tetapi hendak digusur oleh pihak TNI AU? Arry Latulola
	Tematik	Masyarakat Tawiri telah menempati tanah tersebut, tetapi sekarang hendak digusur oleh pihak TNI AU.
	Retoris	Orasi
K4	Proposisi	“Mereka berperkara dengan Pemerintah Negeri Laha dan mereka menang, tapi mengapa tanah orang Tawiri yang mau diambil,” teriak Arry.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Mengapa tanah orang Tawiri yang mau diambil?
	Tematik	Pemerintah Negeri Laha dan mereka menang, tapi mengapa tanah orang Tawiri yang mau diambil
	Retoris	-
K5	Proposisi	Pihak TNI AU mengklaim memiliki hak atas tanah dengan dasar sertifikasi hak pakai tahun 2010 seluas 250 hektar, tetapi tidak pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon
	Sintaksis	-
	Skrip	Berdasarkan siapa pihak TNI AU mengklaim memiliki hak atas tanah dengan dasar sertifikasi hak pakai tahun 2010? Arry Latulola Berapa luas hektar yang mengklaim milik TNI AU tapi tidak pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon? 250 hektar

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Tematik	Tanah dengan dasar sertifikasi hak pakai tahun 2010 seluas 250 hektar, tetapi tidak pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.
	Retoris	Mengklaim, 250 hektar
K6	Proposisi	warga Tawiri setiap malam diintimidasi oleh oknum-oknum dari TNI AU dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan jika tanah yang didiami mereka adalah tanah milik TNI AU
	Sintaksis	-
	Skrip	Kapan Warga Tawiri diintimidasi oleh oknum – oknum dari TNI AU? Setiap malam Siapa aja orang yang berkepentingan dalam menandatangani surat tanah? Warga Tawiri dengan TNI AU Apa yang dilakukan oleh oknum –oknum TNI AU kepada warga Tawiri? dari TNI AU dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan jika tanah yang didiami mereka adalah tanah milik TNI AU.
	Tematik	-
	Retoris	Oknum – oknum TNI AU. Sadis, diintimidasi
K7	Proposisi	Sadisnya lagi, kami diintimidasi dari bulan Juli sampai saat ini dan akhirnya kemarin kami tutup jalan menuju ke Bandara
	Sintaksis	-
	Skrip	Kapan warga Tawiri diintimidasi? Warga Tawiri diintimidasi dari bulan Juni sampai September 2021
	Tematik	-
	Retoris	Sadis, diintimidasi
K8	Proposisi	Bayangkan dari TNI AU dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan jika tanah yang didiami mereka adalah tanah milik TNI AU.,” bebrnya
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa yang mereka lakukan? dari TNI AU dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dan memaksa masyarakat menandatangani surat pernyataan jika tanah yang didiami mereka adalah tanah milik TNI AU
	Tematik	TNI AU memaksa masyarakat menandatangani surat jika tanah yang didiami mereka milik TNI AU
	Retoris	Ganti rugi
K9	Proposisi	TNI AU atas koordinasi dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa orang yang berkepentingan dari sengketa tanah? Perwira TNI AU berkoordinasi dengan Walikota Ambon Richard Louhenapessy

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Tematik	-
	Retoris	Perwira
K10	Proposisi	pihak TNI AU juga melarang pembangunan yang bersumber dari aspirasi anggota DPRD Fraksi Gerindra, karena mereka mengklaim tanah tersebut milik TNI AU
	Sintaksis	-
	Skrip	Pihak siapa yang melarang pembangunan yang bersumber dari aspirasi anggota DPRD karena mengklaim tanah tersebut milik TNI AU? anggota DPRD Fraksi Gerindra
	Tematik	Melarang pembangunan dari aspirasi anggota DPRD Fraksi Gerindra, karena mereka mengklaim tanah tersebut milik TNI AU
	Retoris	Mengklaim
K11	Proposisi	Ratusan warga Tawiri ditemui Wakil Ketua DPRD Melkianus Sairdekut didampingi anggota Komisi II Halimun Saulatu
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa saja yang ditemui oleh Warga Tawiri? Warrga Tawiri temui Wakil Ketua DPRD Melianus Sairdekut di damping Komisi II Halimu Saulatu
	Tematik	-
	Retoris	-
K12	Proposisi	Sairdekut berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Maluku.
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dijanjikan oleh Sairdekut Wakil Ketua DPRD? , Sairdekut berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Maluku
	Tematik	-
	Retoris	Berjanji, Aspirasi, mekanisme
K13	Proposisi	“Nanti persoalan sengketa tanah ini akan disampaikan ke Komisi I untuk membantu mencari solusi terkait keluhan warga Negeri Tawiri ini,” janji Sairdekut.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Isi perjanjiannya seperti apa? persoalan sengketa tanah ini akan disampaikan ke Komisi I untuk membantu mencari solusi terkait keluhan warga Negeri Tawiri ini yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Sairdekut
	Tematik	-
	Retoris	-
K14	Proposisi	Komisi I DPRD Maluku akan mengundang semua pihak, baik itu Pemerintah Negeri Tawiri, Pihak TNI AU, dan perwakilan masyarakat, guna mendapatkan solusi atas masalah yang tengah dihadapi
	Sintaksis	-

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Skrip	Siapa saja yang diundang oleh Komisi I DPRD Maluku untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah? Pemerintah Negeri Tawiri, pihak TNI AU dan perwakilan masyarakat
	Tematik	-
	Retoris	-
K15	Proposisi	ratusan warga ini kemudian membubarkan diri secara tertib meninggalkan Baileo Rakyat Karang Panjang
	Sintaksis	-
	Skrip	Dimana ratusan Warga Tawiri membubarkan diri secara tertib? Di Baileo Rakyat Karang Panjang
	Tematik	-
	Retoris	-

FP 3

Berita tanggal Kamis 18 November 2021 dengan judul berita:

“Warga Kesal TNI AU dan BPN Tidak Hargai Panggilan DPRD”

(1) AMBON, Siwalimanews – Lantaran tidak meng-hadiri rapat pemba-ha-san kepemilikan lahan yang diklaim TNI-AU, masyarakat Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon kesal dan menge-cam keras BPN Kota Ambon dan TNI-AU.

(2) Warga menilai dua institusi itu tidak me-nghargai panggilan Komisi I DPRD Kota Ambon. Sesuai pema-nggilan yang dila-yang-kan Komisi I, Rabu (17/11), warga Tawiri, BPN dan TNI-AU akan hearing untuk membahas lahan yang diklaim milik TNI-AU itu.

(3) Kendatipun TNI-AU dan BPN tidak menghadiri pema-nggilan Komisi I, rapat tetap digelar dan dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Mourits Tamaela didampingi Ketua Komisi I Zeth Pormes dan anggota komisi lainnya.

(4) Pantauan Siwalima, ratusan warga Tawiri Kampung Pisang dan Wailama Kecamatan Teluk Ambon kesal lantaran rapat digelar tanpa kehadiran dua institusi itu. (5) Salah satu warga, Dedy Salembun menyayangkan ketidakhadiran pihak BPN Kota Ambon dan TNI-AU.

(6) “Kami masyarakat Kampong Pisang dan Wailawa kesal dengan tidak hadirnya TNI-AU dalam hal ini Komandan Lanud Pattimura bersama Kepala BPN Kota Ambon itu sama saja tidak menghargai DPRD sebagai wakil rakyat,” ujar Salembun di hadapan Komisi I. (7) Dirinya mengancam jika masalah ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka akan dilakukan aksi tutup jalan seperti yang sebelumnya terjadi.

(8) “Kami pastikan jika tidak ditindaklanjuti apa yang menjadi keluhan kami maka akan ada langkah yang diambil oleh kami yaitu menutup jalan,” ancamannya.

(9)Sementara itu warga lainnya Ari Latulola berharap pertemuan berikutnya pihak-pihak terkait baik TNI-AU maupun BPN harus hadir. (10) “Apa yang disampaikan merupakan suara hati masyarakat Tawiri. (11) Saya kira BPN dan TNI-AU harus menghargai undangan rapat berikutnya. (12) Jangan sampai kejenuhan masyarakat juga dirasakan dan masyarakat akhirnya berontak. (13) Kalau sudah berontak maka akan sulit dilerai,” katanya.

(14)Sementara itu, Ketua Komisi I Zeth Pormes Ketua Komisi I mengaku sesuai aturan administrasi perundang-undangan pertanahan, untuk sebuah penerbit sertifikat tentunya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi.

(15)“Contoh, ada pemberitahuan ke desa paling tidak ada alas hak, ada pengukuran terhadap wilayah yang mau disertifikatkan. Kalau ingin membangun sebuah bangunan untuk kepentingan negara harus dikomunikasikan baik dengan masyarakat sekitar paling tidak Pemkot Ambon diminta fasilitasi agar tidak terjadi masalah,” ungkap Pormes.

(16)Politisi Golkar ini menjelaskan, dari sisi luasan sebesar 209 Hektar diklaim TNI-AU karena memiliki hak pakai. (17) Sementara luasan itu didalamnya itu ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tetapi sudah memiliki alas hak. (18) Ada juga yang sudah punya sertifikat hak milik.

(19)“Bagaimana sebuah sertifikat hak pakai diatas sertifikat hak milik, sehingga untuk proses lahirnya sertifikat juga kabur. (20) Oleh karena itu dalam waktu dekat Komisi I akan melakukan pertemuan bersama dengan Komisi II DPR RI, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Pertahanan untuk membahasa masalah ini. (21) Nantinya sebelum kita melakukan pertemuan di awal Desember akan dilakukan rapat dengan beberapa staf ahli administratif publik dan kuasa hukum dari pemerintah negeri untuk merumuskan konsep dan jadi bekal kita berangkat untuk menyampaikan aspirasi ini, “pungkasnya. (S-51

Tabel 4.6.

Pemberitaan ke 3 “Warga Kesal TNI AU dan BPN Tidak Hargai Panggilan DPRD”

Kalimat	Apek	Keterangan
K1	Proposisi	-
	Sintaksis	-
	Skrip	Kepada siapa masyarakat Desa Tawiri kesal lantaran tidak menghadiri rapat mengenai pembahasan lahan yang diklaim TNI AU? BPN Kota Ambon dan TNI AU
	Tematik	-
	Retoris	Mengancam
K2	Proposisi	pema-nggilan yang dila-yang-kan Komisi I, Rabu (17/11), warga Tawiri, BPN dan TNI-AU akan hearing untuk membahas lahan yang diklaim milik TNI-AU
	Sintaksis	-
	Tematik	Siapa saja akan berurusan membahas lahan yang diklaim milik TNI AU? Warga Tawiri, BPN dan TNI AU Kapan? 17 bukan November

Kalimat	Apek	Keterangan
	Retoris	Dilayangkan, hearing, diklaim
K3	Proposisi	rapat tetap digelar dan dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Mourits Tamaela didampingi Ketua Komisi I Zeth Pormes dan anggota komisi lainnya
	Sintaksis	-
	Skrip	Rapat yang membahas sengketa akan dipimpin oleh siapa? Wakil Ketua Komisi I, Mourits Tamaela didampingi Ketua Komisi I Zeth Pormes dan anggota komisi lainnya
	Tematik	-
	Retoris	-
K4	Proposisi	ratusan warga Tawiri Kampung Pisang dan Wailama Kecamatan Teluk Ambon kesal lantaran rapat digelar tanpa kehadiran dua institusi itu
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa aja yang kesal lantaran rapat digelar tanpa kehadiran? Warga Tawiri Kampung Pisang dan Wailama
	Tematik	-
	Retoris	Institusi
K5	Proposisi	Salah satu warga, Dedy Salembun menyayangkan ketidakhadiran pihak BPN Kota Ambon dan TNI-AU
	Sintaksis	-
	Skrip	Warga siapa yang ketidakhadiran pihak BPN Kota Ambon ? Dedy Salembun Warga Tawiri
	Tematik	-
	Retoris	Menyayangkan
K6	Proposisi	“Kami masyarakat Kampung Pisang dan Wailawa kesal dengan tidak hadirnya TNI-AU dalam hal ini Komandan Lanud Pattimura bersama Kepala BPN Kota Ambon itu sama saja tidak menghargai DPRD sebagai wakil rakyat,” ujar Salembun di hadapan Komisi I.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa yang dikatakan oleh Warga Tawiri Salembun di hadapan Komisi I? masyarakat Kampung Pisang dan Wailawa kesal dengan tidak hadirnya TNI-AU dalam hal ini Komandan Lanud Pattimura bersama Kepala BPN Kota Ambon itu sama saja tidak menghargai DPRD sebagai wakil rakyat
	Tematik	-
	Retoris	-
K7	Proposisi	Dirinya mengancam jika masalah ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka akan dilakukan aksi tutup jalan seperti yang sebelumnya terjadi
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dilakukan oleh salah satu warga Tawiri? mengancam jika masalah ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka akan dilakukan aksi tutup jalan
	Tematik	-
	Retoris	Mengancam, aksi tutup jalan

Kalimat	Apek	Keterangan
K8	Proposisi	Kami pastikan jika tidak ditindaklanjuti apa yang menjadi keluhan kami maka akan ada langkah yang diambil oleh kami yaitu menutup jalan,” ancamannya
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa isi dari kutipan dari warga Tawiri? jika tidak ditindaklanjuti apa yang menjadi keluhan kami maka akan ada langkah yang diambil oleh kami yaitu menutup jalan
	Tematik	Jika masalah ini ditindaklanjuti maka warga akan menutup jalan
	Retoris	Menutup jalan, ancaman
K9	Proposisi	Ari Latulola berharap pertemuan berikutnya pihak-pihak terkait baik TNI-AU maupun BPN harus hadir
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang berharap hadir dalam pertemuan baik TNI AU maupun BPN? Ari Latulola sebagai salah satu Warga Tawiri
	Tematik	-
	Retoris	-
K10	Proposisi	“Apa yang disampaikan merupakan suara hati masyarakat Tawiri
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang disampaikan oleh Ari Latulola merupakan suara hati masyarakat?
	Tematik	-
	Retoris	-
K11	Proposisi	Saya kira BPN dan TNI-AU harus menghargai undangan rapat berikutnya.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa yang diharapkannya? harus menghargai undangan rapat berikutnya
	Tematik	Kira
	Retoris	-
K12	Proposisi	Jangan sampai kejenuhan masyarakat juga dirasakan dan masyarakat akhirnya berontak
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa yang ingin dirasakannya oleh masyarakat Tawiri? Jangan sampai kejenuhan masyarakat juga dirasakan dan masyarakat akhirnya berontak
	Tematik	-
	Retoris	Kejenuhan, berontak
K13	Proposisi	Kalau sudah berontak maka akan sulit dilerai,” katanya
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa yang terjadi jika diharapkannya tidak sesuai? Kalau sudah berontak maka akan sulit dilerai
	Tematik	Kalau sudah berontak maka akan sulit dilerai
	Retoris	Dilerai
K14	Proposisi	Ketua Komisi I Zeth Pormes mengaku sesuai aturan administrasi perundang-undangan pertanahan, untuk sebuah

Kalimat	Apek	Keterangan
		penerbit sertifikat tentunya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa mengaku sesuai aturan administrasi perundang-undangan pertanahan, untuk sebuah penerbit sertifikat tentunya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi? Ketua Komisi I Zeth Pormes Ketua Komisi I
	Tematik	-
	Retoris	-
K15	Proposisi	“Contoh, ada pemberitahuan ke desa paling tidak ada alas hak, ada pengukuran terhadap wilayah yang mau disertifikatkan. Kalau ingin membangun sebuah bangunan untuk kepentingan negara harus dikomunikasikan baik dengan masyarakat sekitar paling tidak Pemkot Ambon diminta fasilitasi agar tidak terjadi masalah,” ungkap Pormes
	Sintaksis	-
	Skrip	Bagaimana: Ketua Komisi I Zeth Pormes adanya pemberitahuan ke desa paling tidak ada alas hak, ada pengukuran terhadap wilayah yang mau disertifikatkan. Ingin membangun sebuah bangunan untuk kepentingan negara harus dikomunikasikan baik dengan masyarakat sekitar paling tidak Pemkot Ambon diminta fasilitas agar tidak terjadi masalah
	Tematik	Paling tidak
	Retoris	-
K16	Proposisi	Politisi Golkar ini menjelaskan, dari sisi luasan sebesar 209 hektar diklaim TNI-AU karena memiliki hak pakai.
	Sintaksis	-
	Skrip	Seberapa luas hektar yang diklaim TNI AU karena memiliki hak pakai oleh Politisi Golkar? 209 hektar
	Tematik	-
	Retoris	Diklaim, hak pakai, 209 hektar
K17	Proposisi	Sementara luasan itu di dalamnya itu ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tetapi sudah memiliki alas hak
	Sintaksis	
	Skrip	Masyarakat belum memiliki sertifikat tetapi sudah memiliki alas hak
	Tematik	Alas hak
	Retoris	-
K18	Proposisi	Ada juga yang sudah punya sertifikat hak milik
	Sintaksis	-
	Skrip	-
	Tematik	-
	Retoris	Hak milik
K19	Proposisi	-
	Sintaksis	-
	Skrip	Bagaimana sebuah sertifikat hak pakai diatas sertifikat hak milik, sehingga untuk proses lahirnya sertifikat juga kabur

Kalimat	Apek	Keterangan
	Tematik	-
	Retoris	Hak pakai diatas hak milik,kabur
K20	Proposisi	dekat Komisi I akan melakukan pertemuan bersama dengan Komisi II DPR RI, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Pertahanan untuk membahas masalah ini
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa saja yang melakukan pertemuan dengan Komisi I? Komisi DPR RI, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Pertahanan
	Tematik	-
	Retoris	Oleh karena dekat Komisi I akan melakukan pertemuan bersama dengan Komisi II DPR RI, Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Pertahanan
K21	Proposisi	dilakukan rapat dengan beberapa staf ahli administratif publik dan kuasa hukum dari pemerintah negeri untuk merumuskan konsep dan jadi bekal kita berangkat untuk menyampaikan aspirasi ini
	Sintaksis	
	Skrip	Siapa saja yang berperan dalam merumuskan konsep dan jadi bekal kita berangkat menyampaikan aspirasi? Beberapa administrasi publik dan kuasa hukum
	Tematik	-
	Retoris	Kuasa hukum

Fp 4

Berita tanggal Rabu 24 November 2021 dengan judul berita:

“Wenno Minta TNI AU Arif dan Bijaksana”

AMBON, Siwalimanews – (1) Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno minta pihak TNI AU dalam hal ini Lanud Pattimura, untuk arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di Negeri Tawiri, khususnya warga di Dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang.

(2)“Kita minta TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran,” tandas Wenno.

(3) Wenno juga menuding konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU, disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.

(4)“Sebenarnya, hampir semua konflik lahan yang terjadi, akibat ulah BPN dan salah satu contoh kasus saat ini di Tawiri,” ucap Wenno. (5)

Menurutnya, jika sejak awal BPN Kota Ambon melakukan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan dan situasi yang benar, maka tidak ada masalah yang terus terjadi, sebab masyarakat yang mendiami dusun Wailawa dan Kampung Pisang lebih dahulu ada, sebelum kehadiran negara, termasuk TNI AU.

(6)Apalagi, ada sebagian masyarakat setempat yang telah memiliki sertifikat hak milik, namun tiba-tiba pada tahun 2010 secara diam-diam BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010.

(7)“Itu yang selama ini terjadi, karena pengukuran tanah selalu melibatkan kepala desa setempat, tetapi yang terjadi di Tawiri tidak seperti itu, maka masyarakat kaget dengan kepemilikan hak pakai oleh TNI AU, apalagi dibarengi dengan tindakan-tindakan yang menurut warga ada intimidasi, khususnya kepada keluarga-keluarga yang bertugas, baik sebagai anggota TNI AU maupun ASN TNI AU dan disuruh menandatangani surat yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan hak,” bebarnya.

(8) Ia mengaku, Komisi I masih menangani masalah ini dan pihaknya juga akan mendatangi BPN untuk meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri. (S-50)

Tabel 4.7.

Pemneritaan ke 4 “Wenno Minta TNI AU Arif dan Bijaksana”

Kalimat	Aspek	Keterangan
K1	Proposisi	I DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno minta pihak TNI AU dalam hal ini Lanud Pattimura, untuk arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di Negeri Tawiri, khususnya warga di Dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang minta pihak TNI AU untuk arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di Negeri Tawiri? Ketua Komisi I DPRD Dimana tempat warga Di Negeri Tawiri yang menyelesaikan persoalan konflik lahan? Dusun Wailawa dan Kampung Pisang
	Tematik	-
	Retoris	Arif dan bijaksana
K2	Proposisi	“Kita minta TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran,” tandas Wenno

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa isi kutipan dari Ketua Komisi I Ambon Wenno? minta TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran
	Tematik	Rakyat sudah mendiami lahan selama ratusan tahun tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak masyarakat karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran
	Retoris	Pengukuran
K3	Proposisi	Wenno juga menuding konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU, disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang setuju dengan konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon? Wenno Ketua Komisi I DPRD
	Tematik	-
	Retoris	Menunding
K4	Proposisi	“Sebenarnya, hampir semua konflik lahan yang terjadi, akibat ulah BPN dan salah satu contoh kasus saat ini di Tawiri,” ucap Wenno
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	
	Tematik	-
	Retoris	-
K5	Proposisi	BPN Kota Ambon melakukan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan dan situasi yang benar, maka tidak ada masalah yang terus terjadi, sebab masyarakat yang mendiami dusun Wailawa dan Kampung Pisang lebih dahulu ada, sebelum kehadiran negara, termasuk TNI AU.
	Sintaksis	-
	Skrip	Tempat di mana yang terjadi sengketa tanah antara Warga Tawiri dengan TNI AU tidak sesuai aturan padahal sudah lama ditempati? Dusun Wailawa dan Kampung Pisang

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Tematik	Jika BPN Kota Ambon sejak awal mengikuti aturan dan situasi sebab masyarakat Dusun Wailawa dan Kampung Pisang sudah lama menempati
	Retoris	Mendiami
K6	Proposisi	sebagian masyarakat setempat yang telah memiliki sertifikat hak milik, namun tiba-tiba pada tahun 2010 secara diam-diam BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang melakukan pengukuran secara diam – diam tanpa memberitahukan kepada Warga Tawiri melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010? Pihak BPN
	Tematik	Warga Tawiri memiliki sertifikat hak milik namun diam-diam BPN melakukan pengukuran tanpa memberitahu kepada warga Tawiri
	Retoris	Hak pakai
K7	Proposisi	karena pengukuran tanah selalu melibatkan kepala desa setempat, tetapi yang terjadi di Tawiri tidak seperti itu, maka masyarakat kaget dengan kepemilikan hak pakai oleh TNI AU, apalagi dibarengi dengan tindakan-tindakan yang menurut warga ada intimidasi, khususnya kepada keluarga-keluarga yang bertugas, baik sebagai anggota TNI AU maupun ASN TNI AU dan disuruh menandatangani surat yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan hak
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa saja yang terkena dampak diintimidasi oleh pihak TNI AU? khususnya kepada keluarga-keluarga yang bertugas, baik sebagai anggota TNI AU maupun ASN TNI AU dan disuruh menandatangani surat yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan hak
	Tematik	Ketika terjadinya pengukuran tanah selalu melibatkan warga tetapi di Tawiri tidak seperti itu maka masyarakat kaget dengan kepemilikan hak pakai oleh TNI AU apalagi dengan tindakan warga yang diintimidasi
	Retoris	Hak pakai,intimidasi,dicabut
K8	Proposisi	Komisi I masih menangani masalah ini dan pihaknya juga akan mendatangi BPN untuk meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri? Pihak Komisi I DPRD meminta kepada BPN
	Tematik	meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri
	Retoris	-

FP 5

Berita tanggal Kamis 25 November 2021 dengan judul berita:

“Jalan Bandara Diblokir Warga”

(1)AMBON, Siwalimanews – Ratusan warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon memblokir jalan menuju ke Bandara Inter-na-sional Pattimura, Rabu (24/11) pagi sekitar pukul 08.30 WIT.

(2)Aksi pemblokir jalan yang sempat menimbulkan kemacetan panjang ini merupakan buntut dari masalah sengketa lahan antara warga Tawiri dengan pihak TNI Angkatan Udara (AU) yang tak kunjung selesai.

(3)Menurut warga, lahan yang ditempati itu merupakan tanah milik Desa Tawiri yang sudah ada sebelum TNI AU berada di kawasan tersebut.

(4) “TNI AU ingin mengambil hak-hak dari kami. Kita minta pihak TNI AU cabut sertifikat hak pakai Nomor 06 tahun 2010,” teriak masyarakat Tawiri sambil memalang jalan.

(5)Kekecewaan warga membuat aksi saling dorong antara pihak TNI AU dan masyarakat Tawiri, lantaran pihak TNI AU berusaha menghalau masyarakat agar tidak menutup akses jalan.

Temui Warga

(6)Sekitar pukul 10.10 WIT terlihat Walikota Ambon Richard Louhenapessy turun ke lokasi pemalangan jalan dan meminta warga untuk membuka akses jalan yang dipalang. Berdasarkan hasil koordinasi antara masyarakat dan walikota akhirnya tepat pukul 11.00 WIT, akses jalan dibuka dan arus lalu lintas dari bandara dan menuju bandara kembali normal.

(7) Didepan masyarakat Tawiri, walikota meminta agar masyarakat membentuk tim yang didalamnya berjumlah 10 orang untuk melakukan pertemuan dengan dirinya di Balai Kota Ambon guna membicarakan masalah tersebut pada pukul 15.30 WIT.

- (8) “Tidak ada orang tua membiarkan anaknya menderita, kalau anaknya minta roti dia tidak mungkin memberikan batu ingat itu. Kalau ada anaknya yang meminta minum, tidak mungkin dia memberikan racun. Ini bukan omongan saja melainkan berasal dari Alkitab,” ucap walikota kepada ratusan masyarakat Tawiri yang melakukan aksi tersebut.
- (9) Oleh karena itu lanjut walikota, apa yang disampaikan ini sudah betul-betul menjadi keprihatinan yang begitu mendalam.
- (10)“Nanti ketemu saya di kantor lalu kita bicarakan aspirasi kalian dengan baik-baik dan dari hati ke hati,” tuturnya.
- (11)Walikota berjanji, nantinya setelah pertemuan dengan warga Tawiri, juga akan dilakukan pertemuan dengan DPRD dan Lanud Pattimura agar persoalan ini dapat diselesaikan.
- (12)Ari Latulola yang ditunjuk sebagai sekretaris tim yang dibentuk oleh Pemerintah Negeri Tawiri mengungkapkan, pihak TNI AU mencoba mengambil hak masyarakat.
- (13)“Yang mereka ingin ambil lahan yang kini dihuni 252 KK, bayangkan saja kalau 252 KK diambil oleh TNI AU,” ucapnya.
- (14)Pernyataan yang mereka buat untuk harus tinggalkan rumah dan tanah mereka ini, tanpa ganti rugi jika diperlukan oleh negara. (15) Ini kan merupakan perbuatan intimidasi dan perbuatan pidana, namun kepolisian hanya diam .
- (16)“Jadi aksi hari ini secara spontan kita lakukan karena mereka datang dengan pakaian loreng lengkap dan senjata hanya untuk datang kasih takut masyarakat,” tandasnya. Ia juga mengaku, warga Tawiri membutuhkan bantuan walikota dalam mengatasi masalah ini.
- Janji Mediasi
- (17)Usai menemui warga di lokasi Jalan Bandara Pattimura, walikota akhirnya mendengarkan keluhan warga Tawiri untuk memfasilitasi pihak mereka dengan TNI AU guna melaksanakan mediasi terkait lahan yang hendak diambil paksa.
- (18)“Pemerintah fasilitasi untuk dibicarakan secara bersama,” kata Louhenapessy kepada wartawan saat melakukan konferensi pers di ruang rapat Vlisingan Balai Kota Ambon, Rabu (24/11).
- (19) Dikatakan, sesuai dengan laporan yang disampaikan warga bahwa adanya intimidasi dalam permasalahan ini yang dilakukan oleh TNI AU, maka pihaknya akan berupaya agar besok (Hari ini- red) akan mengadakan rapat segera dengan pihak TNI.
- (20)“Oleh karena itu setelah masyarakat tokoh-tokoh masyarakat Tawiri, nanti besok (hari ini red) itu kita dengan TNI angkatan udara,” bebernya. (21)Katanya, pemkot akan mempertemukan kedua belah pihak kembali dan dalam persaudaraan sebagai warga negara akan bicarakan dari hati ke hati.

(22)“Saya optimis kita sudah mendengar mereka punya aspirasi, lalu kita dengarkan ini kalau bisa ini pendekatannya on the track-lah ya nah kan ini karena kesalahan pemahaman ini kan,” Tambah Louhenapessy.

(23)Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Negeri Tawiri yang juga merupakan Saniri Negeri, Ari Latulola mengeluhkan, warga sudah sangat resah dengan tindak laku TNI yang mengintimidasi mereka.

(24)“Tekanan surat pernyataan, dan tadi itu (kemarin red) pakai pasukan turun ke pemukiman masyarakat fisik dan psikis tu terganggu,” ungkapnya dengan logat Ambon Kental.

(25)Ia berharap, walikota selaku bapak di kota ini dapat menjembatani proses mediasi antara pihaknya dengan TNI. (26) Dengan tujuan agar kena nyaman warga tidak terusik lagi.

(27)“Kami berharap walikota dengan mediasi hari ini bisa fasilitasi dan kami berharap, tidak akan ada lagi yang seperti itu.(28) Kami berharap dengan walikota memediasi seperti ini ABRI tidak akan lagi melakukan hal-hal seperti ini itu keyakinan kami,” pungkasnya.

Tuding BPN

(29)Ketua Komisi I DPRD Maluku, Yantje Wenno menuding konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU disebabkan karena oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon.

(30)“Sebenarnya, hampir semua konflik lahan yang terjadi akibat ulah BPN dan salah satu contoh kasus saat ini di Tawiri,” ungkap Wenno menanggapi aksi palang jalan menuju Bandara Internasional Pattimura yang dilakukan warga Tawiri.

(31)Menurut Wenno, jika sejak awal BPN Kota Ambon melakukan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan dan situasi yang benar, maka tidak ada masalah yang terus terjadi, sebab masyarakat yang mendiami Dusun Wailawa dan Kampung Pisang lebih dahulu ada, sebelum kehadiran negara termasuk TNI AU.

(32)Apalagi, ada sebagian masyarakat setempat yang telah memiliki sertifikat hak milik, namun tiba-tiba pada tahun 2010 secara diam-diam BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010.

(33)“Itu yang selama ini terjadi, karena pengukuran tanah selalu melibatkan kepala desa setempat, tetapi yang terjadi di Tawiri tidak seperti itu, maka masyarakat kaget dengan kepemilikan hak pakai oleh TNI AU, apalagi dibarengi dengan tindakan-tindakan yang menurut warga ada intimidasi, khususnya kepada keluarga-keluarga yang bertugas, baik sebagai anggota TNI AU maupun ASN TNI AU dan disuruh menandatangani surat yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan hak,” bebernya.

(34) Ia mengaku, komisi I masih menangani masalah ini, dan pihaknya juga akan mendatangi BPN untuk meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri.

(35) Wenno minta pihak TNI AU dalam hal ini Lanud Pattimura untuk arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di Negeri Tawiri, khususnya warga di Dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang.

(36) “Kita minta TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran,” tandas Wenno. (S-51/S-52-S-50)

Tabel 4.8.
Pemberitaan ke 5 “Jalan Bandara Diblokir Warga”

Kalimat	Aspek	Keterangan
K1	Proposisi	Proposisi Ratusan warga Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon memblokir jalan menuju ke Bandara Inter-na-sional Pattimura, Rabu (24/11) pagi sekitar pukul 08.30 WIT
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang memblokir jalan menuju ke Bandara Internasional Pattimura? Ratusan Warga Tawiri Tempat? Bandara Internasional Pattimura Kapan? Rabu 24 November pukul 08.30 WIT
	Tematik	-
	Retoris	Memblokir
K2	Proposisi	Aksi pemblokir jalan yang sempat menimbulkan kemacetan panjang ini merupakan buntut dari masalah sengketa lahan antara warga Tawiri dengan pihak TNI Angkatan Udara (AU) yang tak kunjung selesai
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang terjadi ketika ada aksi pemblokir jalan? Menimbulkan kemacetan panjang yang merupakan masalah sengketa lahan antara Warga Tawiri dengan pihak TNI AU
	Tematik	-
	Retoris	Pemblokir, buntut, tak kunjung
K3	Proposisi	Menurut warga, lahan yang ditempati itu merupakan tanah milik Desa Tawiri yang sudah ada sebelum TNI AU berada di kawasan
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dibicarakan oleh warga Tawiri? lahan yang ditempati itu merupakan tanah milik Desa Tawiri yang sudah ada sebelum TNI AU
	Tematik	-
	Retoris	Cabut sertifikat
K4	Proposisi	“TNI AU ingin mengambil hak-hak dari kami. Kita minta pihak TNI AU cabut sertifikat hak pakai Nomor 06 tahun 2010,” teriak masyarakat Tawiri sambil memalang jalan.

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang ingin disampaikan oleh warga Tawiri? TNI AU ingin mengambil hak-hak dari kami. Kita minta pihak TNI AU cabut sertifikat hak pakai Nomor 06 tahun 2010
	Tematik	-
	Retoris	-
K5	Proposisi	Kekecewaan warga membuat aksi saling dorong antara pihak TNI AU dan masyarakat Tawiri, lantaran pihak TNI AU berusaha menghalau masyarakat agar tidak menutup akses jalan
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dilakukan TNI AU? berusaha menghalau masyarakat agar tidak menutup akses jalan.
	Retoris	-
K6	Proposisi	Sekitar pukul 10.10 WIT terlihat Walikota Ambon Richard Louhenapessy turun ke lokasi pemalangan jalan dan meminta warga untuk membuka akses jalan yang dipalang. Berdasarkan hasil koordinasi antara masyarakat dan walikota akhirnya tepat pukul 11.00 WIT, akses jalan dibuka dan arus lalu lintas dari bandara dan menuju bandara kembali normal
	Sintaksis	-
	Skrip	Sekitar pukul berapa Walikota Ambon menuju lokasi yang ada pemalangnya dan pada pukul berapa akses jalan di buka? Pukul 10.10 WIT Walikota Ambon berkunjung menuju lokasi dan pukul 11.00 WIT akses jalan dibuka Kepada siapa Walikota meminta warga untuk membuka akses jalan? Walikota Ambon Richard
	Retoris	-
K7	Proposisi	Didepan masyarakat Tawiri, walikota meminta agar masyarakat membentuk tim yang didalamnya berjumlah 10 orang untuk melakukan pertemuan dengan dirinya di Balai Kota Ambon guna membicarakan masalah tersebut pada pukul 15.30 WIT
	Sintaksis	-
	Skrip	Walikota minta masyarakat membentuk tim berjumlah berapa? 10 orang untuk melakukan pertemuan di mana? Di Balai Kota Ambon pada pukul berapa? 15.30 WIT
	Retoris	-
K8	Proposisi	“Tidak ada orang tua membiarkan anaknya menderit, kalau anaknya minta roti dia tidak mungkin memberikan batu ingat itu. Kalau ada anaknya yang meminta minum, tidak mungkin dia memberikan racun. Ini bukan omongan saja melainkan berasal dari Alkitab,” ucap walikota kepada ratusan masyarakat Tawiri
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	-

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Tematik	-
	Retoris	Minta roti tidak mungkin memberikan batu, kalau ada anaknya minta minum tidak mungkin dia memberikan racun
K9	Proposisi	walikota, apa yang disampaikan ini sudah betul-betul menjadi keprihatinan yang begitu mendalam
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang disampaikan ini sudah betul-betul menjadi keprihatinan yang begitu mendalam?
	Tematik	-
	Retoris	Aspirasi
K10	Proposisi	“Nanti ketemu saya di kantor lalu kita bicarakan aspirasi kalian dengan baik-baik dan dari hati ke hati,” Walikota DPRD
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Apa yang dibicarakan Walikota kepada warga Tawiri? Ketemuan di kantornya
	Tematik	-
	Retoris	-
K11	Proposisi	Walikota berjanji, nantinya setelah pertemuan dengan warga Tawiri, juga akan dilakukan pertemuan dengan DPRD dan Lanud Pattimura agar persoalan ini dapat diselesaikan
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dijanjikan oleh Warga Tawiri? warga Tawiri, juga akan dilakukan pertemuan dengan DPRD dan Lanud Pattimura agar persoalan ini dapat diselesaikan
	Tematik	-
	Retoris	-
K12	Proposisi	Ari Latulola yang ditunjuk sebagai sekretaris tim yang dibentuk oleh Pemerintah Negeri Tawiri mengungkapkan, pihak TNI AU mencoba mengambil hak masyarakat
	Sintaksis	-
	Skrip	Ari Latulola ditunjuk sebagai apa untuk mengungkapkan bahwa pihak TNI AU mencoba mengambil hak masyarakat? Sebagai sekretaris tim oleh pemerintah Negeri Tawiri
	Tematik	Tanpa ganti rugi
K13	Proposisi	“Yang mereka ingin ambil lahan yang kini dihuni 252 KK, bayangkan saja kalau 252 KK diambil oleh TNI AU dari Ari Latulola sekretaris tim Negeri Tawiri”
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	-
	Tematik	-
	Retoris	252 KK yang ingin diambil
K14	Proposisi	Pernyataan yang mereka buat untuk harus tinggalkan rumah dan tanah mereka ini, tanpa ganti rugi jika diperlukan oleh negara.
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang terjadi jika pihak TNI AU menguasai mereka? Tanpa ganti rugi jika diperlukan negara
	Tematik	-
	Retoris	-

Kalimat	Aspek	Keterangan
K15	Proposisi	Ini kan merupakan perbuatan intimidasi dan perbuatan pidana, namun kepolisian hanya diam
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang polisi lakukan jika terjadi konflik sengketa tanah antara Warga Tawiri dengan TNI AU? Hanya diam saja
	Tematik	-
	Retoris	-
K16	Proposisi	Jadi aksi hari ini secara spontan kita lakukan karena mereka datang dengan pakaian loreng lengkap dan senjata hanya untuk datang kasih takut masyarakat,” tandasnya. Ia juga mengaku, warga Tawiri membutuhkan bantuan walikota dalam mengatasi masalah ini
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang mereka lakukan untuk menakuti Warga Tawiri? dengan pakaian loreng lengkap dan senjata
	Tematik	-
	Retoris	-
K17	Proposisi	Walikota akhirnya mendengarkan keluhan warga Tawiri untuk memfasilitasi pihak mereka dengan TNI AU guna melaksanakan mediasi terkait lahan yang hendak di ambil paksa
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa yang dilakukan walikota setelah mendengar keluhan dari warga Tawiri? untuk memfasilitasi pihak mereka dengan TNI AU guna melaksanakan mediasi terkait lahan yang hendak di ambil paksa
	Tematik	-
	Retoris	Memfasilitasi, mediasi
K18	Proposisi	“Pemerintah fasilitasi untuk dibicarakan secara bersama,” kata Louhenapessy kepada wartawan saat melakukan konferensi pers di ruang rapat Vlisingan Balai Kota Ambon, Rabu (24/11
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Siapa yang memfasilitasi untuk ikut bicara bersama? Louhenapessy Tempatnya di ? Vilisingan Balai Kota Ambon dan Kapan waktunya? Rabu 24 November
	Tematik	-
	Retoris	-
K19	Proposisi	Sesuai dengan laporan yang disampaikan warga bahwa adanya intimidasi dalam permasalahan ini yang dilakukan oleh TNI AU, maka pihaknya akan berupaya agar besok (Hari ini- red) akan mengadakan rapat segera dengan pihak TNI
	Sintaksis	-
	Skrip	Kapan pihak Walikota Ambon untuk mengadakan rapat? Hari ini untuk mengadakan rapat bersama pihak TNI
	Tematik	Warga Tawiri bahwa adanya intimidasi dalam permasalahan yang dilakukan oleh TNI AU maka pihaknya berupaya agar hari ini mengadakan rapat segera dengan pihak TNI
	Retoris	Intimidasi, Hari ini – red

Kalimat	Aspek	Keterangan
K20	Proposisi	“Oleh karena itu setelah masyarakat tokoh-tokoh masyarakat Tawiri, nanti besok (hari ini red) itu kita dengan TNI angkatan udara,” Walikota Ambon
	Sintaksis	-
	Skrip	Oleh karena itu setelah tokoh – tokoh masyarakat Tawiri hari ini bertemu dengan TNI AU
	Tematik	-
	Retoris	Tokoh – tokoh masyarakat Tawiri, Hari ini red
K21	Proposisi	pemkot akan mempertemukan kedua belah pihak kembali dan dalam persaudaraan sebagai warga negara akan bicarakan dari hati ke hati
	Sintaksis	-
	Skrip	-
	Tematik	-
	Retoris	Dari hati ke hati
K22	Proposisi	
	Sintaksis	Saya optimis kita sudah mendengar mereka punya aspirasi, lalu kita dengarkan ini kalau bisa ini pendekatannya on the track-lah ya nah kan ini karena kesalahan pemahaman ini kan,” Tambah Louhenapessy
	Skrip	Kutipan
	Tematik	Warga Tawiri sudah mempunyai aspirasi lalu kita bisa mendengarkannya
K23	Retoris	Aspirasi, kita, on the tracklah
	Proposisi	salah satu tokoh masyarakat Negeri Tawiri yang juga merupakan Saniri Negeri, Ari Latulola mengeluhkan, warga sudah sangat resah dengan tindak laku TNI yang mengintimidasi mereka
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa warga yang mengeluhkan resah dengan tingkah laku TNI? Saniri Negeri, Ari Latulola
K24	Tematik	-
	Retoris	Resah
	Proposisi	“Tekanan surat pernyataan, dan tadi itu (kemarin red) pakai pasukan turun ke pemukiman masyarakat fisik dan psikis tu terganggu,” ungkapnya dengan logat Ambon Kental
	Sintaksis	-
K25	Skrip	-
	Tematik	-
	Retoris	Kemarin red, pasukan turun
	Proposisi	Walikota selaku bapak di kota ini dapat menjembatani proses mediasi antara pihaknya dengan TNI
K26	Sintaksis	-
	Tematik	-
	Retoris	Mediasi, fasilitas
K26	Proposisi	Dengan tujuan agar kena nyaman warga tidak terusik lagi
	Sintaksis	-
	Skrip	Apa tujuan mediasi? Tujuan agar nyaman warga tidak terusik

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Tematik	Agar nyaman warga tidak terusik
	Retoris	Terusik
K27	Proposisi	“Kami berharap walikota dengan mediasi hari ini bisa fasilitasi dan kami berharap, tidak akan ada lagi yang seperti itu. Kami berharap dengan walikota memediasi seperti ini ABRI tidak akan lagi melakukan hal-hal seperti ini itu keyakinan kami,
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	-
	Tematik	-
	Retoris	Mediasi, fasilitasi dan ABRI
K28	Proposisi	Kami berharap dengan walikota memediasi seperti ini ABRI tidak akan lagi melakukan hal-hal seperti ini itu keyakinan kami,” pungkasnya.
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	Siapa yang berharap melakukan mediasi? ABRI
	Tematik	-
	Retoris	-
K29	Proposisi	Komisi I DPRD Maluku, Yantje Wenno menuding konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU disebabkan karena oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon.
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang menuding konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU disebabkan karena oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon? Yantje Wenno Ketua Komisi I DPRD Maluku
	Tematik	-
	Retoris	-
K30	Proposisi	“Sebenarnya, hampir semua konflik lahan yang terjadi akibat ulah BPN dan salah satu contoh kasus saat ini di Tawiri,” ungkap Wenno menanggapi aksi palang jalan menuju Bandara Internasional Pattimura yang dilakukan warga Tawiri.
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa yang bilang hampir semua konflik lahan yang terjadi akibat ulah BPN dan salah satu contoh kasus saat ini di Tawiri? Wenno Ketua Komisi I DPRD Maluku Tempat? Bandara Internasional Pattimura
	Tematik	-
	Retoris	-
K31	Proposisi	Awal BPN Kota Ambon melakukan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan dan situasi yang benar, maka tidak ada masalah yang terus terjadi, sebab masyarakat yang mendiami Dusun Wailawa dan Kampung Pisang lebih dahulu ada, sebelum kehadiran negara termasuk TNI AU
	Sintaksis	-
	Skrip	-
	Tematik	BPN Kota Ambon melakukan berdasarkan aturan – aturan maka tidak ada masalah terus terjadi sebab masyarakat yang mendiami Dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang lebih dahulu ada

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Retoris	-
K32	Proposisi	Apalagi, ada sebagian masyarakat setempat yang telah memiliki sertifikat hak milik, namun tiba-tiba pada tahun 2010 secara diam-diam BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010.
	Sintaksis	-
	Skrip	-
	Tematik	Apalagi sebagian masyarakat telah memiliki sertifikat namun tiba BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010
	Retoris	Diam – diam, hak pakai
K33	Proposisi	“kaget dengan kepemilikan hak pakai oleh TNI AU, apalagi dibarengi dengan tindakan-tindakan yang menurut warga ada intimidasi, khususnya kepada keluarga-keluarga yang bertugas, baik sebagai anggota TNI AU maupun ASN TNI AU dan disuruh menandatangani surat yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan hak,”
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	-
	Tematik	Karena pengukuran tanah selalu melibatkan kepala desa setempat tetapi di Tawiri tidak seperti itu, maka kepemilikan hak pakai oleh TNI AU apalagi dibarengi dengan tindakan yang menurut warga ada intimidasi kepada keluarga yang bertugas
	Retoris	Pengukuran tanah, intimidasi, ASN TNI AU, hak pakai
K34	Proposisi	dan pihaknya juga akan mendatangi BPN untuk meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri
	Sintaksis	
	Skrip	
	Tematik	Pihaknya akan mendatangi BPN meminta agar sertifikat tersebut dicabut karena menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri
	Retoris	Dicabut
K35	Proposisi	Wenno minta pihak TNI AU dalam hal ini Lanud Pattimura untuk arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di Negeri Tawiri, khususnya warga di Dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang
	Sintaksis	-
	Skrip	Siapa khusus warga yang ingin menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi? warga di Dusun Wailawa dan Kampung Pisang
	Tematik	-
	Retoris	Arif dan bijaksana
K36	Proposisi	“Kita minta TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran,” tandas Wenno

Kalimat	Aspek	Keterangan
	Sintaksis	Kutipan
	Skrip	TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran
	Tematik	-
	Retoris	Arif dan bijaksana, ratusan tahun, pengukuran

Dari lima pemberitaan tentang sengketa tanah antara Warga Tawiri dengan TNI AU terdapat empat struktur analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yaitu sintaksis, skrip, tematis dan retoris. Keempat struktur itu dianalisis lagi lebih dalam menjadi beberapa pembagian seperti sintaksis. Dalam tabel tersebut terdapat proposisi yaitu artinya rangkuman dalam satu kalimat, Sintaksis artinya background dalam setiap kalimat seperti apa apakah berdasarkan kutipan yang ada atau hanya sebagai konteks dalam kalimat tersebut. Sedangkan Skrip merupakan struktur dalam 5 W + 1 H yang merupakan sebuah pertanyaan yang ada jawabannya dalam satu kalimat, tematik penghubung antar kalimat satu dengan lainnya dan retoris merupakan suatu penekanan dalam satu kalimat atau merupakan bahasa kiasan.

4.4. Analisis Model Framing Zhongdang Pan dan Kosicki Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis ini dalam pemberitaan baik pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima lalu dalam kalimatnya mengandung konteks atau kutipan.

4.5. Analisis Model Framing Zhongdang Pan dan Kosicki Struktur Skrip

Dari struktur skip dari pemberitaan ke 2 dan kelima mempunyai hal yang sama dalam pemberitaan aksi Warga Tawiri kesal dengan TNI AU. Dalam pemberitaan ke 2 Warga Tawiri merasa terintimidasi dengan pihak TNI AU dengan memaksa tanda tangan jika tanah yang mereka pakai milik TNI AU. Sedangkan

pemberitaan ke 5 kelanjutnya Warga Tawiri kesal dengan pihak TNI AU atas perbuatannya maka warga Tawiri memblokir jalan menuju bandara Internasional Pattimura dan pihak TNI AU berusaha menghalau aksi tersebut sehingga pukul 11.00 WIT Walikota Kota Ambon memberhentikan aksi penutupan jalan untuk meminta warga membuka akses jalan tersebut. Walikota Ambon juga melaksanakan mediasi untuk berkoordinasi antara Warga Tawiri dengan TNI AU.

Pemberitaan 1,3,4,5 memiliki persamaan dalam pemberitaan dan mempunyai kelanjutan cerita tentang sengketa tanah antara warga Tawiri dengan TNI AU yang berkaitan dengan pihak BPN. Pada pemberitaan ketiga, ketika Ketua komisi I DPRD, Zeth Pormes mengadakan rapat untuk menyelesaikan perkara sengketa tanah pihak BPN dan TNI AU tidak hadir warga pun kecewa. Salah satunya warga Dedy Salembun yang bertahun – tahun tinggal di Kampung Pisang dan Wailawa yang sudah menyempatkan dirinya hadir dalam rapat. Tidak hanya itu salah satu warga yang bernama Arry Latulola juga memberikan kesempatan lagi untuk hadir bagi pihak BPN dan TNI AU kalau tidak hadir maka sertifikat nomor 6 tahun 2010 dicabut karena tidak melakukan pengukuran dan persetujuan dari pihak Warga Tawiri. Pada pemberitaan keempat dan kelima Wenno yang merupakan warga Tawiri meminta TNI AU agar arif dan bijaksana dengan melakukan pendataan bagi Warga Tawiri yang sudah lama bertempat tinggal apabila hak tanah itu dipakai oleh pihak TNI AU tidak kaget lagi. Selanjutnya pada pemberitaan 1 sudah ada bukti yang akurat bahwa TNI AU mempunyai sertifikat nomor 6 tahun 2010 Staf Angkatan Perang (KSAP) melalui Surat Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950, telah menginstruksikan kepada TNI AU Cq Pangkalan TNI AU

Pattimura untuk menguasai lapangan terbang, bangunan-bangunan dan alat-alat yang berada di lapangan terbang tersebut.

4.6. Analisis Model Framing Zhongdang Pan dan Kosicki Struktur Tematik

Dari Struktur tematik pada pemberitaan ke dua kalimat ke 3,4 dan 8 tentang Warga Tawiri hendak digusur oleh pihak TNI AU dan pihak TNI AU memaksa tandatangan surat yang didiami oleh pihak TNI AU. Saat yang bersamaan juga pemberitaan ke tiga jika tidak pihak BPN tidak melakukan penanganan konflik sengketa tanah antara Warga Tawiri dengan TNI AU maka susah untuk dilerainya. Apalagi pada pemberitaan ketiga dan kelima sama – sama menyatakan bahwa Warga Dusun Wailawa dan Kampung Pisang sudah lama menempatnya. Pemberitaan pertama kalimat 4, pemberitaan ke kedua kalimat 5 dan pemberitaan ke keempat pada kalimat 2 dan 6 mempunyai hal yang sama dalam pemberitaan tidak melakukan pengukuran terlebih dahulu oleh BPN. Selanjutnya pada pemberitaan pertama kalimat 6 dan 7 menyambung sertifikat 209 hektar sudah ada 50 rumah yang sudah memiliki sertifikat hak milik bukan hak pakai dan dirasa pihak BPN tidak beres.

Pada pemberitaan pertama kalimat 9, pemberitaan ke empat kalimat 7 dan pemberitaan ke tiga kalimat 19 sama – sama membahas hal yang sama yaitu tentang adanya pihak TNI AU melakukan intimidasi kepada Warga Tawiri. Pada pemberitaan pertama kalimat 10, pemberitaan keempat kalimat delapan dan pemberitaan kelima kalimat 34 sama – sama menyambung karena mengenai pihak BPN mencabut sertifikat nomor 6 tahun 2010 karena cacat prosedur. Dalam pemberitaan pertama kalimat 15 sampai 20 saling menyambung satu sama lain

Pihak Lanud Pattimura menghimbau warga yang menempati tanah tersebut wajib lapor agar melakukan pendataan.

Pemberitaan ke ketiga kalimat ke 6 dan pemberitaan ke lima kalimat 32,33 sama – sama tentang BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat dan pada pemberitaan pertama kalimat 31 TNI AU secara resmi secara fisik tanah negara.

4.7. Analisis Model Framing Zhongdang Pan dan Kosicki Struktur Retoris

Pada struktur retorik mengupas tentang pemaknaan dalam setiap kalimat dalam pemberitaan seperti pada pemberitaan pertama BPN Dinilai Benturkan Warga Tawiri Dengan TNI AU dalam kalimat pertama yang menyatakan BPN Kota Ambon jangan benturkan warga Tawiri dengan pihak TNI-AU, jangan benturkan artinya BPN jangan mengancam warga Tawiri dengan TNI AU. Selanjutnya pada kalimat kedua sertifikat nomor 6 tahun 2010 dinilai cacat hukum artinya tidak sesuai dengan hukum. Komisi I DPRD Kota Ambon mencabut sertifikat artinya mengambil sertifikat karena BPN tidak pernah melakukan pengambilan batas dengan pengukuran sehingga sertifikat tidaklah benar. Pada kalimat enam pada kalimat kita tahu tiba – tiba sertifikat ini muncul kata kita ini harusnya diganti kami karena kata kita berarti peneliti juga ikut merasakan dalam kejadian tersebut padahal tidak. Selanjutnya pada kalimat tujuh sertifikat Nomor: 6 di atas tanah 209 hektar harus dicabut artinya diambil dan pada kalimat delapan dan sepuluh sama pemaknaan cacat hukum. Pada kalimat tigabelas Lanud Pattimura Pattimura mem-bagikan surat pemberitahuan ke-pada masyarakat sekitar yang berada di lokasi, yang telah me-nempati secara ilegal terhadap aset negara artinya sudah ada

sebelum adanya sertifikat nomor tahun 2010. Pada kalimat duapuluh sembilan tanggal 14 Februari 1990 menentukan antara lain diatas tanah yang pernah diterbitkan hak eropa misalnya Opstal, Erpacht, Eigendom artinya eigendom artinya hak milik peraturan tanah barat, erpacht artinya meruapakan hak guna usaha dan opstal artinya hak numpang karang.

Pada pemberitaan ke dua pada kalimat pertama , ratusan warga Negeri Tawiri juga mengadakan hal yang sama di DPRD Maluku artinya merujuk hal yang sama ke DPRD dan pada kalimat kedua ada kata menyambangi artinya mengunjungi, kata ulayat artinya hak persekutuan yang di punyai warga. Pada kalimat ke lima hal sama menjadi penekanan yaitu kata mengklaim. Kalimat ke enam ada kata – kata oknum – oknum TNI AU berarti banyak orang – orang pihak TNI AU.

Pada pemberitaan kedua pada kalimat kedua dilayangkan artinya dipanggil dan pada kalimat ke tujuh aksi tutup jalan yaitu tidak ada jalan yang dibuka. Kalimat ke tiga belas artinya susah dilelai susah untuk diselesaikan masalahnya. Pada kalimat ke enam belas Politisi Golkar ini menjelaskan, dari sisi luasan sebesar 209 Hektar diklaim TNI-AU karena memiliki hak pakai. Hak pakai tersebut hak yang sudah dipakai oleh pihak TNI AU.

Pada pemberitaan ke empat mempunyai penekanan yang sama pada pemberitaan pertama, kedua, ketiga. Pada pemberitaan ke lima hampir sama hanya pada kalimat ke delapan “Tidak ada orang tua membiarkan anaknya menderit, kalau anaknya minta roti dia tidak mungkin memberikan batu ingat itu. Kalau ada

anaknya yang meminta minum, tidak mungkin dia memberikan racun yaitu artinya pihak BPN tidak akan mencelakan warga Tawiri yang meminta kepada pihak BPN agar TNI AU agar cabut sertifikat tersebut. Lalu pada kalimat ke sembilan belas dan dua puluh padakata hari ini red berarti hari ini dan pada kalimat dua puluh satu dari hati ke hati berarti dari hati yang paling dalam.

